

# **SIKAP ETIS WAJIB PAJAK DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN**

**(STUDI TENTANG PENGHINDARAN DAN PENGGELAPAN PAJAK  
PADA PENGUSAHA UMKM DI KABUPATEN PACITAN)**

## **SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**RINI TRI HASTUTI  
NIM. 135030400111017**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS  
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
MALANG**

**2018**

Judgments about values are judgments about conditions and the results of experienced objects; judgments about that which should regulate the formation of our desires, affections and enjoyments.  
(John Dewey, The Construction of the Good)



## **TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Sikap Etis Wajib Pajak dalam Pelaksanaan Kewajiban  
Perpajakan (Studi tentang Penghindaran dan Penggelapan Pajak  
pada Pengusaha UMKM di Kabupaten Pacitan)

Disusun oleh : Rini Tri Hastuti

NIM : 135030400111017

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, Februari 2018

Disetujui  
Ketua Komisi Pembimbing,



**Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si**  
**NIP. 19530810 198103 012**

## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 21 Maret 2018  
Jam : 09.30  
Skripsi atas nama : Rini Tri Hastuti  
Judul : Sikap Etis Wajib Pajak dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Studi tentang Penghindaran dan Penggelapan Pajak pada Pengusaha UMKM di Kabupaten Pacitan)

LULUS

### MAJELIS PENGUJI

Ketua,



**Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si**  
**NIP. 19530810 198103 012**

Anggota,



**Rizki Yudhi Dewantara, S.Sos, MPA**  
**NIP. 19770502 200212 1 003**

Anggota,



**Rosalita Rachma A., SE, MSA, Ak**  
**NIP. 19870831 201404 2 001**

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan perauran perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Februari 2018



Rini Tri Hastuti  
NIM.135030400111013

## RINGKASAN

Hastuti, Rini Tri. 2018. Sikap Etis Wajib Pajak dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Studi tentang Penghindaran dan Penggelapan Pajak pada Pengusaha UMKM di Kabupaten Pacitan), Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si, 112 hal +

Penelitian mengenai Sikap Etis Wajib Pajak dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Studi tentang Penghindaran dan Penggelapan Pajak pada Pengusaha UMKM di Kabupaten Pacitan) bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dari sikap penghindaran dan penggelapan pajak pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Pacitan. Diharapkan dari penelitian ini dapat menemukan alasan-alasan yang menjadikan wajib pajak memiliki perilaku untuk melakukan penghindaran dan penggelapan pajak. Sehingga dari hasil penelitian bisa memberikan beberapa solusi untuk meminimalisirnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pada persepsi wajib pajak pengusaha UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Pacitan mengenai penghindaran dan penggelapan pajak. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku penghindaran dan penggelapan pajak oleh wajib pajak pengusaha UMKM di Kabupaten Pacitan masih sering ditemukan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan ini antara lain berkaitan dengan sistem pajak, tingkat kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah, kegiatan ekonomi, kesadaran wajib pajak, sanksi hukum, ketidaktahuan, dan pelayanan dari pegawai pajak. Perbedaan pandangan dari sisi pemerintah dan wajib pajak mengakibatkan tidak selarasnya tujuan dan hasil yang diharapkan oleh pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang tertib dan taat pajak.

Penghindaran dan penggelapan pajak tidak bisa dihapuskan begitu saja jika hanya bergantung pada sikap wajib pajak. Pemerintah harus ikut aktif dalam memberikan motivasi untuk dapat meningkatkan moralitas pengusaha UMKM yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Motivasi tersebut harus berwujud tindakan preventif maupun regresif yang berkelanjutan dan bisa menguntungkan wajib pajak sehingga mereka tidak merasa dirugikan oleh aturan yang mengikat mereka sebagai warga negara.

Kata Kunci: penghindaran pajak, penggelapan pajak, sikap etis, UMKM



## SUMMARY

Hastuti, Rini Tri. 2018. Ethical Attitude Taxpayers in the Implementation of Tax Obligation (A Study about Tax Avoidance and Tax Evasion toward Entrepreneur of MSMEs in Kabupaten Pacitan), Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si, 112 pages +

This study tells about ethical attitude taxpayers in the implementation of tax obligation (a study about tax avoidance and tax evasion toward entrepreneur of MSMEs in Kabupaten Pacitan) aimed to know and analyze kind of attitude taxpayers about tax avoidance and tax evasion in taxpayers of MSMEs in Kabupaten Pacitan. Hoping it can explore some reasons why taxpayer can have the kind of attitude to do tax avoidance and tax evasion. Lastly, the result of this research can give some solutions to minimize those problems.

This study used a case study by using qualitative approach. This study focused on perception of MSMEs entrepreneur taxpayers in Kabupaten Pacitan, talking about tax avoidance and tax evasion. The data collection in this study was using observation, interview, and documentation.

The result of this study showed that attitude of tax avoidance and tax evasion towards MSMEs entrepreneur taxpayers still be found in Kabupaten Pacitan. Some factors that influence those actions such as tax system, trust level of taxpayer toward government, economic activity, taxpayer awareness, sanction of law, ignorance of tax knowledge, and service from tax official. The different point of view between government and taxpayers cause diverse the purpose and the result from government expectation in realizing the citizen to obey the rule of tax.

The tax avoidance and tax evasion cannot easily be eradicated if it was only depend on taxpayers attitude. Government has to take contribution in giving motivations to increase the tax moral of MSMEs Entrepreneur, so it can create an honest attitude to pay the tax. Those motivations should be given in preventive and regressive action continuously and that action need be useful for the taxpayers, so they did not perceive to lose by the rule that bond them as citizen.

Key Words: tax avoidance, tax evasion, ethical attitude, MSMEs

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sikap Etis Wajib Pajak dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Studi tentang Penghindaran dan Penggelapan Pajak pada Pengusaha UMKM di Kabupaten Pacitan)”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr Mochammad Al Musadieq, MBA selaku ketua Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Ketua Progam Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astusi, M.Si selaku dosen ketua komisi pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing serta memberikan saran maupun kritik selama penelitian ini berlangsung.
5. Bapak Yudha Alif Aprilian selaku asisten dosen dari ketua komisi



pembimbing skripsi yang telah ikut membantu dan memberikan arahan dalam pelaksanaan penelitian.

6. Kedua orang tua Bapak Noto Subali dan Ibu Suwartini yang tiada henti memanjatkan doa serta dukungan baik moril maupun materiil selama penulis menempuh studi di FIA-UB.
7. Kakak Edi Eko Wibowo dan kakak ipar Hairika yang telah memberikan motivasi serta semangat yang tiada henti sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
8. Kepada teman-teman seperjuangan Echa, Ifah, April, Hana, Fitri, Stevi, Vivi, Destria, Naning, adik sepupu Lia, Lutfi, dan Ela yang telah menemani dan mendengar keluh kesah perjalanan dalam pengerjaan skripsi ini serta motivator yang tak kalah hebat untuk membangun sebuah pengalaman.
9. Seluruh teman-teman perpajakan 2013 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu atas kebersamaannya selama menuntut ilmu di Universitas Brawijaya.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Februari 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO .....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
RINGKASAN .....	v
SUMMARY .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kontribusi Penelitian .....	9
E. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Empiris .....	12
B. Sikap .....	15
C. Etika .....	16
D. Sikap Etis Perpajakan .....	17
1. Sikap Etis Perpajakan dari Sudut Pandang Wajib Pajak .....	17
2. Sikap Etis Perpajakan dari Sudut Pandang Pemerintah.....	18
E. Ketidakpatuhan Perpajakan.....	22
F. Wajib Pajak .....	26
G. Sistem Pajak .....	26
1. Hukum Pajak .....	27
2. Kebijakan Pajak.....	28
3. Administrasi Perpajakan.....	28
4. Prinsip Pemungutan Pajak.....	30
H. Asas Keadilan dalam Pajak Penghasilan .....	32
I. Tarif Pajak.....	33
J. <i>Presumptive Taxation</i> .....	35
K. <i>Hard-to-Tax Sector</i> .....	38
L. <i>Schedular Versus Global Income Taxes</i> .....	39
M. Alur Berpikir .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Fokus Penelitian.....	44

	Halaman
C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian.....	44
D. Sumber Data .....	45
E. Pengumpulan Data .....	46
F. Instrumen Penelitian.....	47
G Teknik Analisis Data .....	49
H Pengujian Kredibilitas Data .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian .....	52
1. Gambaran Umum Kabupaten Pacitan .....	52
a. Kondisi Geografis dan Demografis .....	52
b. Pariwisata dan Perekonomian .....	52
B. Penyajian Data .....	55
1. Sikap Etis Pengusaha Kecil di Kabupaten Pacitan mengenai Penghindaran dan Penggelapan Pajak .....	55
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil di Kabupaten Pacitan Bisa Memiliki Sikap Etis untuk Menghindari dan Menggelapkan Pajak .....	62
3. Solusi yang dapat Diberikan untuk Meningkatkan Sikap Etis yang Baik guna Menentang adanya Penghindaran dan Penggelapan Pajak .....	71
C. Analisis Data .....	75
1. Analisis Sikap Etis Pengusaha UMKM di Kabupaten Pacitan mengenai Penghindaran dan Penggelapan Pajak.....	76
2. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap Etis Pengusaha Kecil di Kabupaten Pacitan mengenai Penghindaran dan Penggelapan Pajak .....	84
3. Solusi yang dapat Diberikan untuk Meningkatkan Sikap Etis yang Baik guna Menentang adanya Penghindaran dan Penggelapan Pajak .....	94
D. Keterbatasan Peneliti .....	100
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah UMKM di Jawa Timur Tahun 2015 Berdasarkan Skala Usaha. .	5
Tabel 2. Penelitian Terdahulu .....	14
Tabel 3. Perbedaan <i>Global Taxation</i> dan <i>Schedular Taxation</i> .....	40
Tabel 4. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Ponorogo .....	82



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. WP Wajib SPT dan Kepatuhan Menyerahkan SPT 2013 – 2016 .....	3
Gambar 2. Alur Berpikir .....	42
Gambar 3. Kepatuhan Pelaporan SPT dan Pembayaran Pajak WP UMKM Kabupaten Pacitan 2013 – 2016 .....	77
Gambar 4. Alur Pengadministrasian PP 46 Tahun 2013 .....	88



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara WP UMKM .....	108
Lampiran 2 Pedoman Wawancara KPPKP Kabupaten Pacitan .....	111
Lampiran 3 Data Kepatuhan Wajib Pajak Kabupaten Pacitan .....	112





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Membayar pajak bagi masyarakat Indonesia merupakan suatu bentuk sikap warga negara yang baik. Sikap itu sendiri bisa bermakna pada sikap positif dan negatif. Sikap antara individu satu dengan yang lain pun bisa berbeda tergantung pada pemahaman mereka terhadap suatu permasalahan. Menghindari pajak dan menggelapkan pajak bisa merupakan suatu sikap positif jika hal tersebut memang etis untuk dilakukan. Pengukuran baik atau tidaknya, ditentukan oleh etika atau moralitas yang melatarbelakanginya.

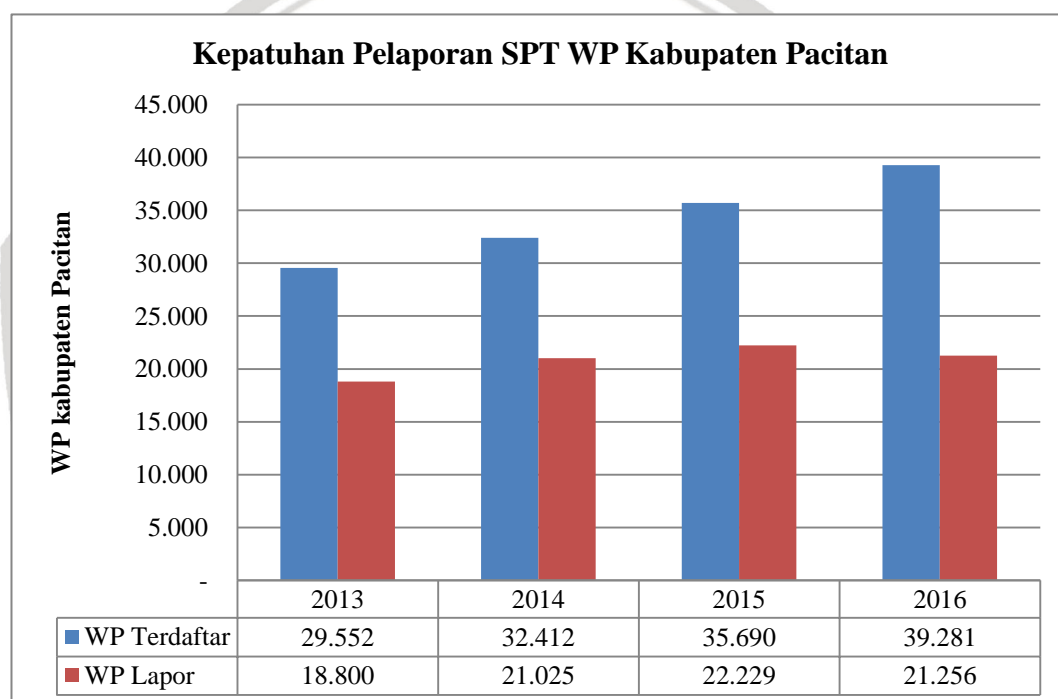
Penghindaran pajak ataupun penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dilakukan dengan berbagai alasan. Pada skala perusahaan multinasional, tindakan penghindaran pajak cenderung dilakukan dalam skema *aggressive tax planning*, sehingga pada akhirnya mengarah pada praktik penggelapan pajak. Penghindaran pajak berat (dalam hal ini termasuk dalam penggelapan pajak) dilakukan dengan melakukan berbagai tindak kecurangan yang disengaja melalui skema-skema perencanaan pajak dalam skala global. Permasalahan ini telah mendapat perhatian dari OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) dengan merumuskan rencana aksi *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)*. Dalam laporan OECD, disimpulkan bahwa tidak ada satu pun aturan pajak yang dengan sendirinya dapat melumpuhkan praktik BEPS. Ketidakterpaduan antara aturan perpajakan domestik

dan aturan perpajakan bilateral (*tax treaty*) di suatu negara, akhirnya dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional maupun orang kaya pribadi untuk menghindari pajak (Darussalam dan Tobing, 2014).

Penghindaran pajak biasanya dilakukan oleh para pelaku bisnis dalam kegiatan transaksional pada manajemen keuangan perusahaan, sedangkan penggelapan pajak bisa dilakukan oleh berbagai oknum yang berkaitan dengan urusan pembayaran pajak. Berbagai macam faktor bisa menjadi pemicu tindakan penggelapan pajak. Tidak hanya perusahaan (wajib pajak badan) saja yang melakukan penggelapan pajak, bahkan rata-rata tingkat penggelapan pajak oleh perorangan lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak perusahaan (Ika, 2012).

Menurut Wallschutzky dalam Nurmantu (2004) sebab-sebab Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak adalah: (1) Wajib Pajak berpersepsi tentang: (a) Tarif pajak terlalu tinggi; (b) Sistem keadilan dan kejujuran dalam perpajakan yang kurang; (c) Bagaimana kebijakan pemerintah dalam membelanjakan uang dari pembayaran pajak oleh Wajib Pajak; (2) Kecenderungan individu yang kurang memahami aturan dan hukum yang berlaku; (3) Perilaku individu yang dipengaruhi oleh kelompok sehingga mempengaruhi individu tersebut melakukan *tax evasion*; (4) *Tax audit*, pelaporan informasi dan potongan dalam pajak; (5) Administrasi pajak yang kurang dimengerti oleh *tax payer*; (6) Praktisi pajak; (7) Kemungkinan ketahuan dan penegakan hukum yang kurang dari pemerintah; dan (8) Servis dari Wajib Pajak yang kurang dinikmati.

Kondisi ketidakpatuhan yang terjadi di Kabupaten Pacitan bisa dilihat dari rasio kepatuhan wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang pada tahun 2016 baru mencapai 54,11 persen. Data Kementerian Keuangan menyebutkan wajib pajak yang terdaftar sebanyak 39.281 WP. Namun realisasi SPT yang diterima oleh kantor pajak hanya 21.256 WP. Lebih lanjut rasio wajib lapor SPT dan kepatuhan WP di Kabupaten Pacitan digambarkan pada gambar 1.



Gambar 1. WP Wajib SPT dan Kepatuhan Menyerahkan SPT 2013 – 2016  
Sumber: Kantor Pajak Pratama Ponorogo, 2017

Bentuk dari ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak bisa berupa penghindaran dan penggelapan pajak. Penghindaran pajak, meskipun bagi sebagian orang dianggap tidak etis, namun masih bisa dibenarkan oleh Undang-undang karena dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan perilaku penggelapan pajak sudah menjadi suatu hal yang

pasti dalam melanggar hukum dengan adanya sanksi yang jelas diatur dalam Undang-undang.

Salah satu contoh kasus penggelapan pajak, dilakukan oleh pengusaha perdagangan dan pendistribusian pupuk di Pacitan senilai Rp 371,28 juta. Pengusaha tersebut berinisial BW, telah menunggak pajak sejak tahun 2007 hingga akibatnya pejabat pajak dengan dibantu pihak kepolisian terpaksa melakukan tindakan penyanderaan kepada yang bersangkutan (Sugiyarto: 2016). Istilah penyanderaan atau *gezelling* digunakan dalam bidang perpajakan yang merujuk pada pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak di tempat tertentu (Rahayu: 2013). Penyanderaan bisa dilakukan apabila penanggung pajak mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya 100 juta dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

BW tersebut merupakan salah satu dari 6,8 juta pengusaha dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Timur yang lebih lanjut rinciannya pada Tabel 1 menggambarkan bahwa mayoritas masih banyak persebaran usaha berada pada skala usaha mikro, disusul dengan usaha kecil, dan baru usaha menengah. Di Jawa Timur, koperasi dan UMKM tumbuh dengan pesat. Pada 2008, terdapat 4,2 juta UMKM dan terhitung hingga tahun 2015 tumbuh menjadi 6,8 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur yang tinggi, yakni 54,98% dari total PDRB sebesar Rp 1.689,88 triliun, dan menyerap 11,12 juta tenaga kerja atau 92% dari seluruh tenaga kerja di Jawa Timur (Fariq, Desember 2016).

**Tabel 1. Jumlah UMKM di Jawa Timur Tahun 2015 Berdasarkan Skala Usaha**

Total Usaha Mikro	6.533.694	95,72%
Total Usaha Kecil	261.827	3,84%
Total Usaha Menengah	30.410	0,45%
<b>TOTAL UMKM</b>	<b>6.825.931</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Timur (2015).

Kabupaten Pacitan sendiri merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan tingkat pertumbuhan perekonomian yang kurang berkembang. Bahkan masih bisa dikatakan tertinggal jika dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitarnya seperti Ponorogo ataupun Trenggalek. Heterogenitas jenis usaha di Kabupaten Pacitan masih sangat sedikit. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Pacitan masih ditopang oleh lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, selain itu, sektor perdagangan dan konstruksi yang mencapai 68,26 persen. Indeks Pembangunan manusia (IPM) serta kemiskinan di Kabupaten Pacitan juga masih berada dibawah angka rata-rata Provinsi (Anonim: 2016).

Kegiatan perekonomian di Kabupaten Pacitan masih didominasi oleh usaha mikro dan kecil dengan begitu wajib pajak pengusaha diberi kewenangan untuk menghitung pajaknya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Maksud dan tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah untuk menjangkau wajib pajak yang memiliki kecenderungan sulit untuk dipajaki (*hard to tax*). Namun kemudian muncul permasalahan ketidakadilan karena dalam peraturan ini hanya mengatur tarif tunggal melalui perhitungan omzet, bukan pendapatan bersih. Selain itu tidak

adanya pengakuan atas kerugian mengakibatkan wajib pajak tetap harus membayar pajak, padahal jelas-jelas ada unsur ketidakmampuan membayar dalam kasus seperti ini.

Permasalahan-permasalahan seperti diatas sangat dikhawatirkan bisa memunculkan persepsi etis menggelapkan pajak sehingga wajib pajak enggan membayar pajak. Hal tersebut dikarena pada kondisi-kondisi tertentu orang akan lebih memilih untuk menyimpan uangnya sendiri dibanding jika harus diberikan pada pihak ketiga yang notabenenya tidak ada sangkut pautnya dengan kelangsungan usaha.

McGee (2012) menyatakan etika penghindaran dan penggelapan pajak dapat dikategorikan menjadi empat pandangan, yaitu: (1) penggelapan pajak tidak beretika; (2) penggelapan pajak selalu beretika; (3) penggelapan pajak kadang-kadang bisa beretika; dan (4) merupakan suatu keharusan menggelapkan pajak. Pandangan-pandangan tersebut muncul karena berbagai alasan yang melatarbelakanginya. Terlepas bahwa penggelapan pajak merupakan suatu yang ilegal namun beberapa pandangan ini juga telah menunjukkan bagaimana peraturan yang dibuat oleh pemerintah bisa diterima dan diterapkan oleh masyarakat yang menjalaninya. Pasalnya setiap orang memiliki kepentingan masing-masing yang perlu juga untuk diperhatikan, sehingga sikap etis yang paling bisa menggambarkan keadaan yang terjadi pada wajib pajak di Indonesia adalah pada pandangan ketiga.

Fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara perlu ditanamkan pada cara pikir wajib pajak sebagai suatu keharusan. Peraturan perpajakan yang dibuat



oleh pemerintah harusnya bisa ditaati oleh semua wajib pajak tanpa terkecuali. Pemerintah sendiri dengan segala upaya berusaha membuat wajib pajaknya patuh melalui langkah-langkah preventif seperti sosialisasi hingga represif berupa tindakan penahanan.

Aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam membayar pajak tidak bisa terlepas dari pemahaman mereka tentang menghindari dan menggelapkan pajak itu sendiri. Dalam hubungannya dengan moralitas atau sikap etis, menggelapkan pajak merupakan suatu pilihan yang bisa dilakukan ketika tujuan, fungsi, dan kegunaannya dipertanyakan (McGee: 2012). Legalitas saja tidak bisa dijadikan acuan untuk menjadikan seseorang untuk patuh membayar pajak karena adanya kesempatan untuk melakukan tindak kecurangan, apalagi dengan sistem *self assessment* dimana tingkat kejujuran wajib pajak yang sangat diandalkan. Disisi lain dengan adanya *self assessment*, tingkat pengawasan juga semakin longgar sehingga dapat mendorong wajib pajak melakukan ketidakpatuhan.

Melihat permasalahan diatas perlu adanya studi khusus mengenai ketidakpatuhan karena penelitian yang membahas sikap etis tentang ketidakpatuhan masih jarang ditemukan. Fokus utama dalam penelitian ini akan melihat sudut pandang dari wajib pajak mengenai etika penghindaran dan penggelapan pajak. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“SIKAP ETIS WAJIB PAJAK DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN (Studi tentang Penghindaran dan Penggelapan Pajak pada Pengusaha UMKM di Kabupaten Pacitan)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah:

1. Bagaimana sikap etis pengusaha kecil di Kabupaten Pacitan mengenai penghindaran dan penggelapan pajak?
2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi pengusaha kecil di Kabupaten Pacitan bisa memiliki sikap etis untuk menghindari dan menggelapkan pajak?
3. Bagaimanakah solusi yang dapat diberikan untuk meningkatkan sikap etis yang baik guna menentang adanya penghindaran dan penggelapan pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Menjelaskan sikap etis pengusaha kecil di Kabupaten Pacitan mengenai penghindaran dan penggelapan pajak.
2. Menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengusaha kecil di Kabupaten Pacitan bisa memiliki sikap etis untuk menghindari dan menggelapkan pajak.
3. Menjelaskan solusi yang dapat diberikan untuk meningkatkan sikap etis yang baik guna menentang adanya penghindaran dan penggelapan pajak.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis berupa:

##### **1. Kontribusi Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai pandangan sikap etis mengenai penghindaran dan penggelapan pajak menurut wajib pajak (pengusaha UMKM), konsep penghindaran dan penggelapan pajak dari sisi wajib pajak dan pemerintah, serta bagaimana sikap pemerintah terhadap adanya praktik penghindaran dan penggelapan pajak.

##### **2. Kontribusi Praktis**

Penelitian ini akan memberikan tambahan wawasan bagi peneliti, masyarakat (pengusaha UMKM), dan pemerintah seputar dunia perpajakan khususnya pada permasalahan mengenai sikap etis penghindaran dan penggelapan pajak di tengah tuntutan persaingan bisnis yang semakin kompleks.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperjelas rincian dari hasil penelitian ini, akan disajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi permasalahan yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian mengenai penghindaran dan penggelapan pajak

khususnya pada wajib pajak pengusaha UMKM di Kabupaten Pacitan serta memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan teori etika, ketidakpatuhan perpajakan, sistem, dan tarif pajak yang digunakan sebagai dasar pembahasan dan analisis permasalahan, juga meliputi tinjauan empiris dan landasan teori lain yang berkaitan dengan penyusunan penelitian.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah penelitian yang meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis data.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang memuat penyajian data, analisis data dan interpretasi data yang diperoleh selama penelitian berlangsung sehingga hasil penelitian tersebut akan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada BAB I.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan secara garis besar serta saran atas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan diharapkan dapat

berguna bagi masyarakat (pengusaha UMKM) dan pemerintah dalam menyikapi permasalahan penghindaran dan penggelapan pajak yang masih umum terjadi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris mengacu dari tiga penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam pengambilan tema, dengan begitu akan didapat gambaran hasil penelitian seperti apa saja yang telah dilakukan berkaitan dengan sikap etis penghindaran dan penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh McGee, *et. al.*, (2008) tentang penggelapan pajak (*tax evasion*) dilakukan melalui persepsi dari dua budaya yang berbeda, yaitu pada mahasiswa bisnis di Hongkong dan Amerika Serikat. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapat bahwa penggelapan pajak bisa dipandang etis tergantung pada keadaan. Beberapa alasan yang paling sering diberikan untuk membenarkan penggelapan pajak adalah atas dasar moral yaitu ketidakmampuan masyarakat untuk membayar pajak, adanya korupsi oleh pemerintah, tarif pajak tinggi atau tidak mendapatkan banyak imbalan atas pembayaran pajak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mahasiswa di Hongkong lebih banyak membenarkan tindakan penggelapan pajak dibandingkan dengan mahasiswa di Amerika Serikat.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Prasetyo (2010) terhadap wajib pajak di wilayah Surakarta. Hasil penelitian menggambarkan bahwa mayoritas dari pegawai swasta, wiraswasta dan juga pegawai negeri sipil tidak setuju dengan adanya berbagai bentuk praktik penggelapan pajak. Sedangkan Reskino (2013) meneliti persepsi mahasiswa akuntansi dari dua kelompok berbeda yaitu



mahasiswa akuntansi program S1 dan mahasiswa akuntansi program Magister Akuntansi. Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara persepsi mahasiswa akuntansi program S1 dan mahasiswa akuntansi program S2. Namun mahasiswa akuntansi program S1 lebih menganggap penggelapan pajak adalah tidak etis dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi Program S2.

Penelitian yang akan penulis lakukan memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu pada tema penelitian sehingga nantinya akan diambil beberapa item pertanyaan yang disesuaikan untuk menyusun dalam kerangka naskah wawancara, sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu antara lain: (1) lokasi penelitian; (2) jumlah responden yang akan diteliti; dan (3) metode penelitian yang digunakan berbeda berupa jenis penelitian, metode pengumpulan data dan teknis analisis data. Penggunaan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini diharapkan akan bisa mendapatkan hasil yang lebih mendalam mengenai alasan-alasan yang mendasari terbentuknya sikap etis dari wajib pajak dibanding dengan penelitian kuantitatif yang telah dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Penjabaran hasil penelitian menggunakan narasi akan bisa memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih akurat mengenai apa yang dirasakan langsung oleh wajib pajak mengenai perilaku ketidakpatuhan. Terdapat penambahan topik penelitian dengan membandingkan sikap etis perpajakan dari sisi pemerintah untuk mendapatkan titik temu dari permasalahan penghindaran dan penggelapan pajak, sehingga hasil yang diharapkan dari penelitian ini tidak semata menggambarkan dari satu sisi wajib pajak seperti penelitian-penelitian sebelumnya.

**Tabel 2. Penelitian Terdahulu**

No	Nama (Tahun)	Judul	Rumusan Masalah	Metodologi		Hasil Penelitian
				Variabel	Responden	
1.	McGee, <i>et. al.</i> , 2008 (in <i>Journal of Bussiness Ethics</i> )	<i>A Comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong Vs the United States</i>	- <i>What is the moral decision of an individual person and what ethical standards does an individual live by?</i> - <i>Would the reasons to justify people's desire to evade taxes vary with respect to different cultural contexts?</i>	Pandangan dua kelompok pelajar di dua negara berbeda mengenai penggelapan pajak	263 responden	Penggelapan pajak selalu atau hampir selalu tidak etis. Sedangkan argumen paling mendukung penggelapan pajak adalah apabila pemerintahan-nya korup.
2.	Prasetyo, 2010 (Skripsi)	Persepsi Etis Penggelapan Pajak bagi Wajib Pajak di Wilayah Surakarta	Bagaimana persepsi etis penggelapan pajak bagi Wajib Pajak di wilayah Surakarta?	- Penggelapan pajak - Persepsi wajib pajak	67 responden	Sebagian besar responden memiliki persepsi tidak setuju dengan berbagai macam bentuk penggelapan pajak
3.	Reskino, 2013 (Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4)	Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak	Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi program S1 dan mahasiswa akuntansi program S2 (Magister Akuntansi) mengenai penggelapan pajak ( <i>tax evasion</i> )?	Persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak ( <i>tax evasion</i> )	121 responden	Mahasiswa akuntansi program S1 lebih menganggap penggelapan pajak adalah tidak etis dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi Program S2

## B. Sikap

Menurut Ahmadi (2007:151), Sikap adalah kesiapan merespon yang bersifat positif atau negatif terhadap objek atau situasi secara konsisten. Pendapat ini memberikan gambaran bahwa sikap merupakan reaksi mengenai objek atau situasi yang relatif stagnan yang disertai dengan adanya perasaan tertentu dan memberi dasar pada orang tersebut untuk membuat respon atau perilaku dengan cara tertentu yang dipilihnya.

Azwar (2005), menggolongkan definisi sikap dalam tiga kerangka pemikiran. Pertama, kerangka pemikiran yang diwakili oleh para ahli psikologi seperti Louis Thurstone, Rensis Likert dan Charles Osgood. Menurut mereka sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Berarti sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut.

Kedua, kerangka pemikiran ini diwakili oleh ahli seperti Chief, Bogardus, LaPierre, Mead dan Gordon Allport. Menurut kelompok pemikiran ini sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Dapat dikatakan bahwa kesiapan yang dimaksudkan merupakan kecenderungan yang potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon .

Ketiga, kelompok pemikiran ini adalah kelompok yang berorientasi pada skema triadik (*triadic schema*). Menurut pemikiran ini suatu sikap merupakan

konstelasi komponen kognitif, afektif dan konatif yang saling berinteraksi di dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap suatu objek.

Dari definisi-definisi di atas menunjukkan bahwa secara garis besar sikap terdiri dari komponen kognitif (ide yang umumnya berkaitan dengan pembicaraan dan dipelajari), perilaku (cenderung mempengaruhi respon sesuai dan tidak sesuai) dan emosi (menyebabkan respon-respon yang konsisten).

Sikap (*attitude*) adalah pernyataan-pernyataan evaluatif) baik menyenangkan atau tidak menyenangkan) mengenai objek, orang, atau peristiwa. Mereka merefleksikan bagaimana perasaan kita terhadap sesuatu. Sikap tersebut memiliki tanggapan yang sederhana namun alasan-alasan mendasarnya mungkin rumit. (Robbins dan Judge, 2015: 43-44)

### C. Etika

Etika merupakan suatu ukuran moralitas dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam budaya atau lingkungan tertentu (Velasquez, 2005). Tujuan eksplisitnya adalah menentukan sejauh mana dapat menentukan standar yang benar atau yang didukung oleh penalaran yang terbaik, dan demikian etika mencoba mencapai kesimpulan tentang moral yang benar dan salah serta moral yang baik dan jahat. Shomali (2001) mengemukakan bahwa etika memiliki sifat tidak absolut yang disebut dengan relativisme etika, yaitu pandangan bahwa tidak ada prinsip moral yang benar secara universal; kebenaran semua prinsip moral bersifat relatif terhadap budaya atau pilihan individu (tidak komprehensif).

Di Indonesia perilaku penghindaran dan penggelapan pajak masih tergolong sebagai perilaku yang tidak beretika. Hal tersebut didasari karena penghindaran dan penggelapan pajak merupakan tindakan yang bisa dianggap merugikan pihak tertentu demi mendapat keuntungan pribadi, namun pada kenyataannya pihak yang melakukan masih beranggapan bahwa perilakunya tersebut bukan sesuatu yang salah untuk dilakukan. Meski demikian, untuk menilai etika dalam perpajakan perlu untuk melihat penilaian dari pandangan mayoritas karena berhubungan dengan banyak pihak.

#### **D. Sikap Etis Perpajakan**

Terdapat dua sudut pandang dalam penjelasan mengenai sikap etis perpajakan. Pertama, sudut pandang dari masyarakat (wajib pajak) dengan melihat seberapa penting membayar pajak kepada Negara. Kedua, sudut pandang pemerintah yang mengharapkan kesadaran penuh dari warga negaranya untuk membayar pajak secara patuh.

##### **1. Sikap Etis Perpajakan dari Sudut Pandang Wajib Pajak**

Moralitas merupakan suatu pilihan dari keputusan yang diambil dalam menghadapi suatu permasalahan. Termasuk dalam hal membayar pajak, seseorang secara naluriah akan berusaha untuk menghemat uang pajak yang harus dibayar karena mereka tidak mendapat kontra prestasi secara langsung. Namun, akibat terbatasnya ruang gerak dalam lingkup legalitas, para wajib pajak ini hanya bisa melakukan penghindaran atau penggelapan pajak jika memang ada kesempatan untuk melakukannya.



McGee (2012) telah banyak merangkum argumen-argumen terkait pro dan kontra mengenai moralitas penggelapan pajak. Argumen-argumen tersebut didasarkan pada dua pemikiran yakni: (1) kewajiban pada siapakah seseorang dalam melakukan pekerjaannya, misal dalam hal ini adalah pilihan untuk memenuhi tugas kepada Tuhan, Negara, individu lain, dan (mungkin) klien; dan (2) hubungan antara individu kepada Negaranya.

Argumentasi yang mendukung mengenai penggelapan pajak lebih mengedepankan permasalahan ketidakadilan pada sistem pajak ataupun keadaan situasi politik negara yang memihak golongan tertentu. Menurut pendapat tersebut, hak dasar manusia adalah kebebasan melakukan kegiatan demi keuntungannya sendiri tanpa melanggar hak orang lain dengan tidak perlu memenuhi kewajiban pada pihak tertentu yang sifatnya memaksa.

Argumentasi lain yang tidak mendukung adanya penggelapan pajak didasarkan pada alasan sosial serta untuk mendukung negaranya, karena sebagai warga negara yang baik, setiap individu harus mematuhi semua peraturan yang berlaku pada negara tersebut. Termasuk diantaranya beberapa argumen menyatakan bahwa moralitas untuk ikut serta membangun negara merupakan tanggung jawab semua masyarakat yang hadir pada negara tersebut. Pemikiran utama pada argumentasi ini adalah pada tanggung jawab sosial bersama dengan tidak melihat dari sudut pandang keuntungan pribadi.

## **2. Sikap Etis Perpajakan dari Sudut Pandang Pemerintah**

Dari sudut pandang pemerintah, pajak memiliki dua fungsi yang menjadikan masyarakat harus taat pajak. Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan



manfaat pokok dari pajak itu sendiri (Harjo, 2013: 7). Pada umumnya terdapat 2 macam fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Fungsi Anggaran)

Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini salah satunya diperoleh dari penerimaan pajak. Fungsi anggaran ini adalah fungsi pokok atau fungsi utama pajak atau disebut juga fungsi fiskal yakni suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana dari masyarakat ke kas Negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Fungsi anggaran disebut sebagai fungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara. Hal tersebut memiliki maksud antara lain:

- a. Jangan sampai terdapat Wajib Pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakannya.
- b. Jangan sampai terdapat Objek Pajak yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada fiskus.
- c. Jangan sampai terdapat Objek Pajak yang terlepas dari pengamatan atau perhitungan fiskus.

Dengan demikian maka optimalisasi pemasukan dana ke Kas Negara tidak hanya bergantung kepada fiskus saja atau kepada Wajib Pajak saja, namun juga berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

## 2. Fungsi *Regulerend* (Fungsi Mengatur)

Fungsi ini adalah fungsi tambahan, yaitu fungsi dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. (Waluyo dan Ilyas, 2003: 6). Terdapat dua penerapan fungsi ini, yakni penerapan fungsi secara positif dan penerapan fungsi secara negatif (Marihot Pahala Siahaan, 2010: 44 dalam Harjo, 2013: 16). Penerapan fungsi secara positif adalah cara mengatur dengan tujuan memberi dorongan ke arah suatu tujuan positif tertentu dengan maksud untuk mengatur perekonomian guna mencapai pertumbuhan yang lebih cepat. Fungsi mengatur dengan cara yang bersifat negatif adalah cara mengatur yang dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi perkembangan atau menjuruskan kehidupan masyarakat ke arah tertentu.

Selain kedua fungsi diatas, terdapat penjelasan lain yang mendukung bagaimana sikap etis perpajakan yang diharapkan pemerintah dari wajib pajaknya yang ditinjau dari berbagai aspek. Melalui penjelasan dari berbagai perspektif ini diharapkan masyarakat semakin dapat menerima kenyataan bahwa penting untuk berpartisipasi langsung dalam membiayai keperluan Negara melalui pajak.

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan (Waluyo dan Ilyas, 2003: 5). Dominasi kontribusi pajak dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun semakin naik. Pajak yang dibayarkan inilah akan mengalir lagi ke masyarakat dalam bentuk sarana dan

prasarana. Dengan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan mampu meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat sehingga masyarakat akan meningkat pula tingkat kesejahteraannya. Harjo (2013: 16) menyatakan masyarakat berperan benar dengan melakukan perhitungan pajak dan tepat waktu dalam melakukan pembayaran dan pelaporan kewajiban pajaknya, sehingga bisa membantu pemerintah dalam menyediakan dana untuk melakukan roda pemerintahan khususnya menyediakan sarana dan prasarana perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ditinjau dari aspek hukum, menurut Harjo (2013: 16) masyarakat akan rela melakukan kewajiban perpajakannya apabila uang yang akan mereka setorkan ke kas Negara jelas perhitungan dan peruntukannya dengan didasarkan pada peraturan yang jelas dan sah. Termasuk di dalamnya dengan adanya kelengkapan sarana perundang-undangan diharapkan pemerintah dapat menegakkan *law enforcement* di bidang perpajakan (Waluyo dan Ilyas, 2003: 7).

Pendekatan dari aspek keuangan lebih dititik beratkan pada penerimaan Negara ditinjau dari aspek keuangan Negara. menurut Harjo (2013: 17) penerimaan pajak yang semakin tinggi menunjukkan peningkatan peranan sertaan masyarakat secara langsung terhadap pembangunan Negara yang diindikasikan dengan semakin meningkatnya *tax ratio*.

Ditinjau dari aspek sosiologi pajak merupakan gejala sosial yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri dengan melihat dampaknya dalam masyarakat akibat adanya pemungutan pajak oleh Negara. Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakatnya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya akan semakin

mudah bagi fiskus untuk memungut pajak dari mereka dan dana yang akan masuk ke kas Negara akan bertambah besar (Harjo, 2013: 17).

### **E. Ketidakpatuhan Perpajakan**

Kondisi perpajakan di Indonesia menuntut kepatuhan yang tinggi dari wajib pajaknya. Wajib pajak harus aktif dalam membayarkan maupun melaporkan pajaknya kepada pemerintah karena sistem pemungutan yang dianut Indonesia adalah *self assesment system*. Hal tersebut menjadikan sebagian besar pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak (dilakukan sendiri ataupun bisa dengan bantuan ahli) bukan oleh fiskus.

Menurut Rahayu (2013:138) kepatuhan dalam hukum pajak meliputi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakekatnya telah memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan.

Ketidakpatuhan dengan melakukan perlawanan terhadap pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meloloskan diri dari pajak. Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak. Perlawanan terhadap pajak ini akan mempengaruhi jumlah penerimaan negara dari sektor pajak.

Ketidakpatuhan wajib pajak secara umum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Beberapa pengertian penghindaran pajak yang dikemukakan oleh empat ahli dalam Zain (2003:49-50):

1. Penghindaran pajak merupakan usaha yang sama sekali tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (**Harry Graham Balter**).
2. Penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan yang secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak (**Ernest R. Mortenson**).
3. Penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (**N.A. Barr, S.R. James, A.R. Prest**).
4. Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan (**Robert H. Anderson**).

Sedangkan penggelapan pajak menurut empat ahli yang sama, diartikan sebagai berikut:

1. **Harry Graham Balter** memberi pengertian mengenai penggelapan pajak, yaitu sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan.
2. **Ernest R. Mortenson** mengemukakan bahwa penggelapan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindari dari dari pengenaan pajak.
3. **N.A. Barr, S.R. James, A.R. Prest** memberi pengertian penggelapan pajak mengandung arti sebagai manipulasi secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.
4. **Robert H. Anderson** mengatakan bahwa penggelapan pajak adalah penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang.

Walaupun memiliki pengertian yang berbeda, penghindaran pajak dan penggelapan pajak memiliki maksud dan tujuan yang sama, yaitu untuk



meminimalkan atau bahkan menihilkan jumlah pajak yang harus dibayar. Oleh karenanya masih banyak para ahli pajak yang meragukan legalitas dan moralitas penghindaran pajak. Pasalnya penghindaran pajak yang dilakukan baik oleh wajib pajak pribadi maupun badan seringnya dilakukan dalam jumlah nominal yang besar dengan skema perencanaan pajak yang rumit. Seperti misalnya penghindaran pajak dengan skala internasional yang melibatkan negara *tax haven*.

Kang (2016) menyimpulkan pendapat beberapa ahli pajak mengenai penghindaran pajak dari perpektif psikologi bahwa penghindaran pajak bisa memiliki definisi luas termasuk melalui pengertian yang mengacu pada berbagai aktivitas, perencanaan atau pengaturan yang dapat mengurangi jumlah pajak yang jelas harus dibayar. Dengan begitu, penggelapan pajak bisa diartikan dengan penghindaran pajak yang memang memiliki maksud untuk melanggar peraturan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki keinginan untuk menghindar pajak dapat melakukannya dengan berbagai strategi tergantung pada perilaku mereka terhadap perpajakan, pengetahuan dan kemauan untuk mempekerjakan ahli pajak (konsultan pajak), dan lain sebagainya. Bentuk strategi bisa bervariasi, dari memanfaatkan celah peraturan perpajakan antar negara atau melakukan kecurangan pada pemerintah.

Terdapat dua aspek berbeda yang terungkap dari praktik penghindaran pajak yaitu, *aggressive tax planning* atau *abusive tax planning*. Meski demikian, dua hal tersebut masih perlu dianalisa lebih dalam tergantung pada subjektivitas interpretasi pada perilaku terhadap resiko serta moral. Ketidakpatuhan yang dilakukan melalui penghindaran pajak, perlu dibedakan antara wajib pajak yang



masih patuh dan wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak berat dan harus diadili. Penghindaran pajak yang masih diperbolehkan hanya akan menyebabkan permintaan barang dikenakan pajak berkurang, sehingga berakibat meningkatnya penabungan, atau bertambahnya permintaan akan barang lain dan sekaligus terjadi penambahan dalam produksi barang terakhir dan berkurangnya barang-barang yang dikenakan pajak berat.

Asumsi yang dikemukakan oleh Leon Yudkin dalam Moh. Zain (2003: 43) bahwa perilaku wajib pajak mengarah pada tindakan meminimalkan pajak yang harus dibayar adalah: (1) bahwa wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terhutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) bahwa wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak, yaitu usaha penghindaran pajak yang terutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya tersebut kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin pula bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama.

Dalam perspektif administrasi perpajakan, penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah upaya memanfaatkan peluang *loopholes* dalam aturan pajak sehingga dianggap tidak melawan hukum. Sedangkan penggelapan pajak atau *tax evasion* cenderung menutupi fakta material pajak yang semestinya dibayar, dengan demikian dianggap melawan hukum (Rahayu, 2010). Namun demikian Pierre Moscoivici (dalam Khairani, 2016) menyatakan bahwa meskipun tidak ada aturan yang dilanggar (dengan mencari *loopholes* dalam aturan perpajakan),

skema perencanaan pajak yang dilakukan untuk menghindari pajak dianggap sebagai perbuatan *unacceptable*.

#### **F. Wajib Pajak**

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rosdiana dan Irianto, 2011). Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Pengertian menurut perundang-undangan perpajakan, tidak disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang yang sudah memiliki NPWP saja dan wajib untuk membayar pajak. Pengertian yang terkandung di dalam undang-undang, orang yang belum memiliki NPWP pun dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak apabila benar-benar sudah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang dimaksud dalam istilah perpajakan adalah orang pribadi atau badan atau pemotong dan pemungut yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak walaupun belum memiliki NPWP dan kepadanya terdapat hak dan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **G. Sistem Pajak**

Sistem perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur kebijakan pajak, hukum pajak, dan administrasi pajak. Ketiga unsur tersebut saling berhubungan satu sama lain, bersinergi, bekerja sama secara harmonis,

sama kuat dan sama stabil, sehingga dapat menopang sistem perpajakan untuk mencapai tujuan negara dalam target perolehan penerimaan pajak secara optimal. (Rahayu, 2013: 75-94)

Sistem perpajakan di negara berkembang disusun sama dengan negara lain dengan memperhatikan bahwa sistem pajak tersebut harus bisa mencerminkan struktur ekonomi, kapasitasnya pada administrasi pajak, kebutuhan pelayanan publik, dan hasil pendapatan untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan negara. Bird (2013) menyatakan penting juga untuk memasukkan faktor '*tax morale*', '*tax culture*' dan meningkatkan level kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintahannya supaya sistem perpajakan yang baik bisa terwujud.

### **1. Hukum Pajak**

Hukum pajak merupakan suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak (Rahayu, 2013). Hukum pajak selalu mengalami perkembangan dan tidak terlepas dari kepentingan negara dan kepentingan warga negara. Selain itu hukum pajak juga dapat difungsikan untuk menunjang pembangunan nasional terutama dalam hal meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sifat hukum pajak juga tidak terbatas pada mengatur pada administrasi negara (hukum publik) saja. Hukum pajak juga mempunyai hubungan dengan hukum perdata. Terutama dalam kasus penghindaran pajak, erat kaitannya hukum perdata ini karena sifatnya yang personal mengatur pada hak dan kewajiban wajib pajak. Bagi para pelanggarnya, hukum pajak juga masih mengatur tentang sanksi

pidana (hukum pidana) supaya bisa menimbulkan efek jera dan memberikan kepastian hukum.

## 2. Kebijakan Pajak

Lauddin Marsuni (2006) (dalam Rahayu, 2013: 90), merumuskan kebijakan perpajakan sebagai berikut: (1) suatu pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif; (2) suatu tindakan pemerintahan dalam rangka memungut pajak, guna memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara; (3) suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan dana bagi negara.

Kebijakan pajak merepresentasikan komitmen pemerintah untuk menyejahterakan masyarakatnya, mendorong perkembangan dunia usaha, dan pencapaian program-program pemerintah lainnya (Rosdiana dan Irianto, 2011:2). Sehingga kebijakan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan ekonomi atau kebijakan pendapatan negara (*fiscal policy*). Kebijakan pajak ini juga digunakan sebagai alat oleh pemerintah untuk bisa mencapai tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Namun dalam proses perancangannya juga tetap harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang pemerintah selaku penguasa.

## 3. Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak (Shonar Lumbantoruan, 1997 dalam Rahayu, 2013). Prosedur

yang dimaksud meliputi tahap-tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penagihan pajak. Tahap-tahap yang tidak solid dapat menjadi sumber kecurangan yang akan dimanfaatkan oleh wajib pajak tidak patuh (Rahayu, 2013:93).

Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses mencapai sasaran yang diharapkan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak karena administrasi perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem perpajakan yang dipakai.

Sistem administrasi pajak yang baik tidak akan berjalan lancar untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai jika dalam pelaksanaannya tidak berdasarkan manajemen yang baik. Penerapan manajemen modern diperlukan melalui perencanaan (*planning*) yang baik, pengorganisasian (*organizing*) yang tepat, pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) yang berkesinambungan.

Menurut Mansury (dalam Rosdiana, 2011:4) untuk terselenggaranya suatu administrasi perpajakan yang baik harus memenuhi dasar-dasar sebagai berikut:

1. Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan perundang-undangan yang memudahkan bagi administrasi dan memberi kejelasan bagi wajib pajak.
2. Kesederhanaan akan mengurangi penyelundupan pajak. Kesederhanaan dimaksud, baik dalam perumusan yuridis yaitu memberikan kemudahan untuk dipahami, maupun kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh aparat dan pemenuhan kewajiban oleh wajib pajak.



#### 4. Prinsip Pemungutan Pajak

Fritz Neumark (dalam Rahayu, 2013:65) menerangkan mengenai *Social Justice* bahwa keadilan sosial dalam sistem perpajakan harus memperhatikan:

1. *Universality Principle*

Setiap orang yang mampu membayar pajak, harus dipajaki secara universal, artinya kepada orang-orang tersebut diberi beban pajak yang sama. Dan bahwa pembebasan-pembebasan dari setiap wajib pajak harus meliputi semua bidang dan lapangan sosial ekonomi masyarakat.

2. *The Equality Principle*

Orang-orang atau badan dalam posisi ekonomi yang sama harus menanggung utang pajak yang sama pula.

2. *The Ability to pay Principle*

Jumlah beban pajak dipikul oleh individu sesuai dengan kemampuannya untuk memikul beban pajak itu, dengan memperhatikan semua sifat-sifat yang melekat pada individu, sehingga kerugian yang timbul sebagai akibat pengenaan pajak akan menjadi sama.

3. *The Principle of Distribution*

Prinsip ini menghendaki bahwa distribusi beban pajak diantara penduduk harus mempunyai akibat untuk memperkecil perbedaan penghasilan dan kekayaan yang disebabkan oleh mekanisme pasar bebas.

Sedangkan menurut Adam Smith (1776) (dalam Rahmat, 2011), ada empat prinsip yang harus dipegang teguh dalam pemungutan pajak:



1. *Equality*, yaitu pajak harus adil dan merata, dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut, dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya.
2. *Certainty*, yaitu pajak tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaliknya pajak itu harus dari semula jelas bagi semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat. Apabila tidak pasti kepada Wajib Pajak tentang kewajiban pajaknya, maka pajak yang terhutang tergantung kepada kebijaksanaan petugas pajak yang dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan dirinya. Bagi Adam Smith kepastian adalah lebih penting dari keadilan, apabila tanpa kepastian bisa timbul adanya ketidakadilan. Kepastian menurut Adam Smith harus bisa menjamin terciptanya keadilan dalam pemungutan pajak yang diinginkan, yaitu kepastian tentang Subyek Pajak, kepastian tentang Obyek Pajak, kepastian tentang tarif pajak yang berlaku dan kepastian tentang prosedur pajak.
3. *Convenience*, yaitu saat Wajib Pajak harus membayar pajak hendaknya ditentukan pada saat yang tidak akan menyulitkan Wajib Pajak
4. *Economy*, yaitu biaya pemungutan bagi kantor pajak dan biaya memenuhi kewajiban pajak oleh Wajib Pajak hendaknya sekecil mungkin. Pajak hendaknya tidak menghalangi Wajib Pajak untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan ekonomisnya, pajak harus dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dari pada beban yang dipikul oleh masyarakat.

## H. Asas Keadilan dalam Pajak Penghasilan

Asas keadilan merupakan salah satu dari asas utama dalam rangka pemungutan pajak, yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berpartisipasi dalam pembiayaan fungsi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing. Pengertian keadilan juga tidak bersifat mutlak namun relatif bergantung pada kondisi sistem suatu negara.

Asas keadilan di bidang perpajakan juga dibedakan antara keadilan vertikal dan horisontal. Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan perpajakan telah diterapkan asas keadilan perpajakan (Mansury, 1996 dalam Rahmat, 2011):

### 1. *Horizontal Equity*

Suatu pemungutan pajak dikatakan adil secara horizontal, apabila jumlah beban pajak yang terutang oleh Wajib Pajak yang mendapatkan penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama adalah sama besar tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan. *Horizontal equity* disebut juga dengan *equal treatments for the equals*. Pemungutan pajak penghasilan dianggap memenuhi keadilan horizontal apabila memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Definisi Penghasilan: Semua tambahan kemampuan ekonomis, yaitu semua tambahan kemampuan untuk dapat menguasai barang dan jasa, dimasukkan dalam pengertian objek pajak atau definisi penghasilan.
- b. *Globality*: semua tambahan kemampuan itu merupakan ukuran dari keseluruhan kemampuan membayar atau '*the global ability to pay*', oleh karena itu harus dijumlahkan menjadi satu sebagai objek pajak.
- c. *Net Income*: yang menjadi *ability to pay* adalah jumlah netto setelah dikurangi semua biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan itu karena bagian penerimaan yang telah dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh penghasilan tidak dapat dipakai lagi oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, biaya bukan merupakan tambahan kemampuan ekonomis.
- d. *Personal Exemption*: Wajib Pajak Orang Pribadi diperkenankan mendapatkan pengurangan untuk mempertahankan hidup layak (PTKP) bagi dirinya sendiri dan anggota keluarganya dalam menghitung jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.

- e. *Equal treatment for the equals*: jumlah seluruh penghasilan yang memenuhi definisi penghasilan, apabila jumlahnya sama, dikenakan pajak dengan tarif pajak yang sama, tanpa membedakan jenis-jenis penghasilan atau sumber penghasilan.
2. *Vertical Equity*
- Suatu pemungutan pajak dikatakan adil secara vertikal apabila orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda dikenakan Pajak Penghasilan yang berbeda setara dengan perbedaannya atau biasa disebut dengan *unequal treatment for the unequals*. Syarat-syarat keadilan vertikal adalah:
- a. *Unequal treatments for the unequals*: yang membedakan besarnya tarif adalah jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis, bukan karena perbedaan sumber penghasilan atau perbedaan jenis penghasilan.
  - b. *Progression*: apabila jumlah penghasilan Wajib Pajak lebih besar, dia harus membayar pajak lebih besar dengan menerapkan tarif pajak yang persentasenya lebih besar.

## I. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah suatu penetapan atau presentase berdasarkan Undang-undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan/atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan/atau dipungut oleh Wajib Pajak (Luqman, 2016). Tarif pajak secara umum ditentukan dalam bentuk presentase (%).

Secara umum terdapat 4 tarif perpajakan (Syusanti, 2015: 10):

1. Tarif pajak proporsional atau tarif sebanding/sepadan, yaitu persentase pengenaan pajak yang tetap atas berapa pun dasar pengenaan pajaknya, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak. Jadi semakin tinggi dasar pengenaan pajak, semakin besar pajak yang terutang.

2. Tarif pajak progresif berupa persentase yang meningkat apabila jumlah yang dikenai pajak juga meningkat. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibedakan menjadi:
  - a. Tarif Progresif Progresif: kenaikan persentase tarifnya semakin besar.
  - b. Tarif Progresif Tetap: kenaikan persentase tarifnya tetap.
  - c. Tarif Progresif Degresif: kenaikan persentase tarifnya semakin kecil.
3. Tarif pajak degresif adalah tarif yang persentasenya semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
4. Tarif pajak tetap atau *flat tax* adalah tarif yang persentasenya tetap berapapun dasar pengenaan pajaknya.

Sistem pajak dengan tarif flat adalah sistem pemungutan pajak yang menerapkan suatu tarif tertentu dikenakan terhadap suatu jumlah penghasilan. Menurut Hall dan Rabushka (1983: 32-52), prinsip-prinsip *flat tax* sebagai kerangka suatu sistem perpajakan secara keseluruhan meliputi:

- a. Seluruh penghasilan hanya boleh dikenakan pajak sebanyak satu kali dan harus sedapat mungkin mencerminkan sumbernya.
- b. Seluruh penghasilan dikenakan pajak dengan tarif proporsional (*flat*) yang sama tanpa progresivitas.
- c. Besarnya pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak tergantung dari kemampuan ekonomi Wajib Pajak. Semakin tinggi kemampuan ekonomi Wajib Pajak maka semakin besar pula jumlah pajak yang harus disetorkan Wajib Pajak ke Kas Negara

- d. Surat Pemberitahuan Pajak untuk individu dan badan harus dibuat sederhana mungkin dan seluruh informasi yang diperlukan dalam Surat Pemberitahuan Pajak dalam bentuk sederhana dan dapat dituangkan dalam kartu pos.

#### J. *Presumptive Taxation*

Dalam volume pertama bukunya yang berjudul *Tax Law Design*, Thuronyi (1996: bab 12: 1-2) menyatakan bahwa *presumptive taxation* adalah metode penentuan kewajiban pajak secara tidak langsung. Maksud dari istilah *presumptive* adalah adanya asumsi bahwa jumlah penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak tidak lebih kecil dari jumlah penghasilan yang ditentukan secara tidak langsung. Terdapat beberapa alasan penggunaan teknik *presumptive* yaitu:

1. Kemudahan terutama untuk Wajib Pajak dengan *turnover* yang sangat rendah (dan beban administratif untuk melakukan pemeriksaan atas Wajib Pajak tersebut).
2. Untuk mengatasi penghindaran pajak (yang berfungsi bila indikator yang menjadi dasar *presumption* lebih sulit untuk disembunyikan daripada pencatatan akuntansi).
3. Metode *presumptive* dapat meratakan beban pajak melalui indikator pengenaan pajak yang objektif, terutama bila metode akuntansi tidak dapat lagi diandalkan karena Wajib Pajak tidak mentaati peraturan dan adanya korupsi. dapat meningkatkan Wajib Pajak melakukan pencatatan secara benar, karena akan menyebabkan pengenaan pajak yang lebih besar bila catatan



tersebut tidak tersedia. adanya efek insentif yaitu Wajib Pajak dengan jumlah penghasilan yang lebih besar tidak harus membayar pajak lebih besar.

4. Alasan penerimaan negara, keadilan, kesulitan politis atau teknik.

*Presumptive taxation* dapat digunakan untuk seluruh jenis pajak yang didasarkan dari pencatatan akuntansi seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea cukai atau pajak penjualan, namun lebih umum digunakan untuk pajak penghasilan. Metode *presumptive* dapat dibedakan berdasarkan jenis Wajib Pajak yang dituju yaitu untuk Wajib Pajak usaha kecil dan tenaga ahli, Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan secara keseluruhan, termasuk perusahaan besar.

Metode penentuan penghasilan dalam Metode *Presumptive* adalah sebagai berikut (Thuronyi, 1996: bab 12: 6-12):

1. Metode *Net worth*

Bila informasi penting mengenai pendapatan Wajib Pajak tidak tersedia, metode yang umum digunakan untuk memperkirakan pendapatan adalah dengan menentukan besarnya perubahan *net worth* selama tahun pajak tertentu dan menambahkan besarnya konsumsi Wajib Pajak dengan memeriksa gaya hidup Wajib Pajak. Kesulitan yang dihadapi dalam menggunakan metode ini untuk menentukan penghasilan adalah mendapatkan informasi mengenai kekayaan dan pengeluaran dari Wajib Pajak yang tidak mau bekerjasama.



## 2. Metode Tabungan pada Bank

Metode lain yang dapat digunakan untuk menentukan penghasilan adalah tabungan Wajib Pajak (baik pada bank lokal maupun luar negeri) dan untuk membuat asumsi. Seluruh tabungan dianggap sebagai penghasilan kecuali Wajib Pajak dapat membuktikan sebaliknya. Metode ini dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan perkiraan penghasilan tergantung dari praktek usaha Wajib Pajak. Bila Wajib Pajak merasakan bahwa pengenaan pajak dengan metode ini tidak adil maka Wajib Pajak diperbolehkan untuk membuktikan dengan pembukuan laba rugi yang aktual.

## 3. Metode Pengeluaran

Metode ini digunakan bila informasi mengenai kekayaan Wajib Pajak tidak tersedia, sehingga penghasilan ditentukan berdasarkan jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh Wajib Pajak. Metode ini digunakan di Perancis dan Jerman.

## 4. Persentase Peredaran bruto

Dalam metode ini yang menjadi dasar penentuan penghasilan adalah peredaran bruto. Keuntungan dari metode ini adalah sangat mudah untuk diterapkan dan dapat meningkatkan penerimaan negara. Adapun kelemahan dari metode ini adalah korelasi yang kecil antara penghasilan dan peredaran bruto yang diterima oleh Wajib Pajak untuk suatu tahun tertentu. Disamping itu, persentase peredaran bruto yang dimiliki oleh setiap jenis industri berbeda-beda dan tergantung pada tingkat integrasi suatu perusahaan tertentu

dan jenis produk atau jasa yang diberikan. Penggunaan persentase yang sama untuk semua perusahaan akan menyebabkan penentuan penghasilan bersih yang tidak akurat.

#### 5. Persentase Aktiva

Dalam metode ini yang menjadi dasar penentuan penghasilan adalah persentase tertentu dari aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan.

#### K. *Hard-to-Tax Sector*

Definisi yang digunakan oleh banyak peneliti di bidang ini bervariasi antara satu dengan yang lain bergantung pada metode dan indikator yang digunakan. Namun, dari berbagai definisi tersebut, pengertian *hard-to-tax sector* dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori (Elam, 2016). Pertama, kegiatan ekonomi yang dilakukan secara ilegal, seperti penyelundupan, perjudian, prostitusi, dan perdagangan narkoba. Kedua, kegiatan ekonomi yang memiliki sifat legal, tetapi pendapatan yang diterima tidak dilaporkan kepada otoritas pajak, sehingga tidak terkena pajak.

Dengan klasifikasi seperti itu, tidak heran bila *hard-to-tax-sector* bahkan disebut sebagai fenomena ‘hantu’ sekaligus ‘gunung es’ karena otoritas pajak tidak mengetahui siapa mereka dan hanya dapat melihat sebagian kecil dari aktivitasnya (Bird & Wallace, 2003). Di Indonesia, kebijakan untuk *hard-to-tax sector* seringkali bersifat *presumptive tax*. Ini berarti, pemajakan untuk sektor ini menggunakan metode basis perhitungan yang tidak langsung, yang berbeda dari

aturan umum. Teknik ini digunakan karena beragam alasan, salah satunya untuk tujuan simplifikasi administrasi pajak. *Presumptive tax* memang menjadi alternatif kebijakan di berbagai negara, terutama jika didominasi oleh wajib pajak yang tergolong *hard-to-tax sector*. Wajib pajak tersebut sebagian besar tidak mempunyai transparansi keuangan yang memungkinkan pengenaan pajak yang efektif oleh pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah mengestimasi atau mengasumsikan besar pendapatan yang seharusnya dikenakan pajak.

#### **L. *Schedular Versus Global Income Taxes***

Dua teoritikal struktur model pajak penghasilan orang pribadi yang sering digunakan adalah *schedular income tax* dan *global income tax*. “*Schedular income tax* biasanya digunakan pada jenis penghasilan yang memiliki perbedaan kategori khusus dengan penghasilan pada umumnya. Sedangkan *global income tax* lebih sering dipakai dengan satu jenis tarif umum untuk berbagai bentuk penghasilan, darimanapun asalnya.” (Burns dan Krever, 1998).

Pada standar sistem *schedular*, *gross income* dan *deductible expenses* digunakan secara terpisah untuk setiap jenis penghasilan. Terkadang pengurangan diperbolehkan hanya pada batas tertentu saja atau bahkan tidak ada sama sekali. Tarif pajak diterapkan berbeda dari setiap jenis penghasilan juga prosedur pengenaannya diberlakukan secara berbeda setiap jenis penghasilan, mulai dari sistem pemungutan, pembayaran, dan pelaporan.

Pada sistem *global income tax*, tidak ada jenis penghasilan tertentu yang secara khusus harus diberlakukan berbeda. Semua penghasilan dan pengurangnya

diberlakukan sama sebagai jenis objek pajak penghasilan. Penerapan *global income tax* murni, tidak mengenal istilah penghasilan dari pekerjaan tertentu. Lebih lanjut, perbedaan penggunaan *schedular* dan *global income taxes* dijelaskan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Perbedaan *Global Taxation* dan *Schedular Taxation***

	<b><i>Global Taxation</i></b>	<b><i>Schedular Taxation</i></b>
<i>Tax treatment</i>	<i>Equals treatment for the equals.</i> Semua penghasilan digabungkan dengan tidak membeda-bedakan asal dan sumber/jenis penghasilan	<i>Tax treatment</i> dibeda-bedakan berdasarkan sumber/jenis penghasilan. Artinya suatu jenis penghasilan mempunyai perlakuan pajak yang berbeda dengan penghasilan yang lain
Tarif	Hanya ada 1 struktur tarif yang diperlakukan terhadap total penghasilan tersebut	Tarif berbeda-beda, tergantung sumber/ jenis penghasilannya
Perhitungan Penghasilan Kena Pajak	Dasar pengenaannya adalah <i>net income</i> , karena itu <i>global gross income</i> dikurangkan terlebih dahulu dengan <i>tax reliefs</i>	Dasar pengenaannya adalah <i>gross income</i> atau <i>deemed profit/deemed taxable income</i> , karena itu tidak ada <i>tax reliefs</i> .
Sistem Pemungutan dan pengkreditan	Umumnya digunakan <i>self assessment system</i> atau kombinasi antara <i>self assessment system</i> dengan <i>withholding tax</i> . Pajak yang dipotong oleh pihak ketiga dapat dijadikan sebagai kredit pajak.	Umumnya digunakan sistem <i>withholding tax</i> , pajak yang sudah dipotong pihak ketiga tidak dapat dijadikan sebagai kredit pajak.

Sumber: Rosdiana dan Irianto, 2012 (*diolah*)

Di Indonesia, kedua sistem diatas sama-sama diterapkan secara bersamaan. Secara umum penghasilan akan dikenakan menggunakan sistem *global income tax*. Namun untuk penghasilan dari jenis pekerjaan atau *passive income* tertentu diberlakukan *schedular income tax*. Jenis pajak ini biasanya akan banyak diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Surat Edaran.

Pada struktur pajak sektor UMKM, pemerintah menggunakan sistem *schedular income tax* dengan menerapkan tarif tunggal yang berbeda dengan pengenaan tarif pajak penghasilan pada umumnya. Perhitungan yang dilakukan menggunakan dasar pengenaan penghasilan bruto tanpa ada kredit pajak maupun pengurang berupa *tax relief*. Pembayaran pajaknya harus disetor tiap bulan serta tetap melaporkan SPT pajaknya pada akhir periode.

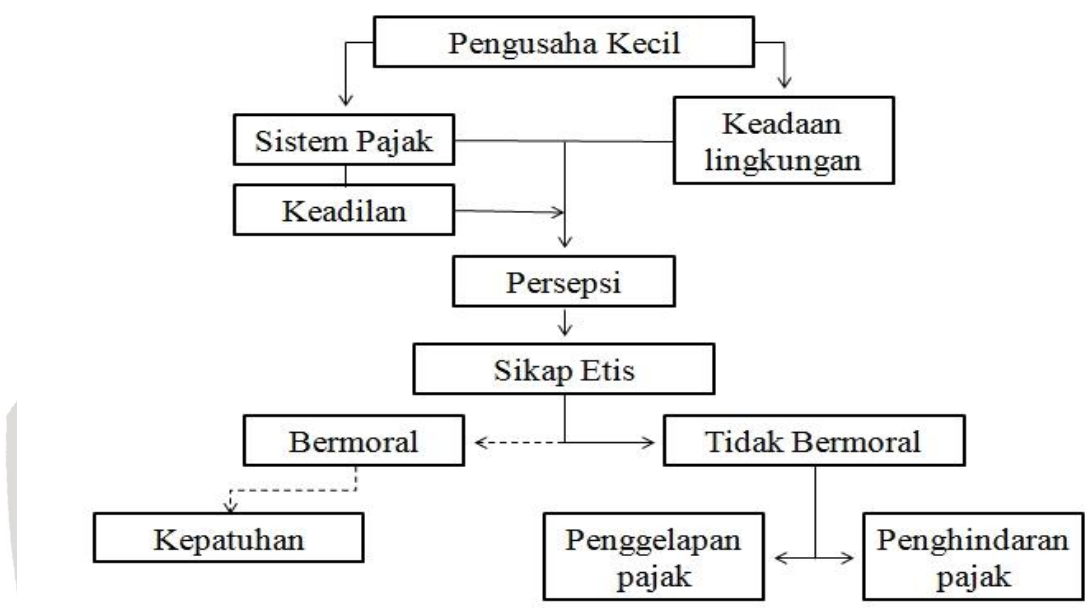
### **M. Alur Berpikir**

Pengusaha kecil sebagai Wajib Pajak di Kabupaten Pacitan mempunyai peranan penting dalam menyumbang kestabilan perekonomian daerah. Berdasarkan skala usaha, perekonomian di daerah dikelompokkan dalam beberapa skala, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, suatu usaha dapat dikategorikan sebagai usaha kecil apabila memiliki kekayaan bersih pada sebesar 50 juta hingga 500 juta rupiah atau memiliki hasil penjualan tahunan antara 300 juta sampai dengan 2,5 miliar rupiah.

Pengusaha kecil mempunyai kewajiban untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar berdasarkan sistem pemungutan pajak penghasilan yaitu *self assessment system*. Pemerintah sendiri memiliki kewenangan untuk merancang sistem pajak yang cocok untuk diterapkan di suatu negara tanpa mengabaikan asas keadilan dalam setiap unsur pembentuknya. Selain kedua hal tersebut, keadaan suatu lingkungan daerah juga bisa menjadi faktor pendukung untuk memberikan persepsi dalam pola pikir,



sehingga akan membentuk sikap etis masyarakat dalam membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar. Sikap etis yang bermoral akan mewujudkan perilaku kepatuhan, sedangkan sikap etis yang tidak bermoral bisa memunculkan perilaku penghindaran atau pun bahkan penggelapan pajak.



Keterangan:  
 —> : Alur Fokus Penelitian  
 -.-> : Bukan Fokus Penelitian

Gambar 2. Alur Berpikir



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian studi kasus, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam fenomena yang menjadi sasaran penelitian (Stake dalam Creswell, 2009: 13). Menggunakan jenis penelitian studi kasus akan dapat mengeksplorasi pendapat pemilik usaha kecil mengenai sikap etis penghindaran dan penggelapan pajak di wilayah Kabupaten Pacitan.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya (Creswell, 2009). Dengan menggunakan metode kualitatif, maka data yang didapat akan lebih mendalam, penuh makna dan kredibel sehingga tujuan penelitian dapat dicapai.

Melalui metode penelitian dalam bentuk naratif akan dapat menjabarkan hasil analisis data dari informan tentang bagaimana sikap pengusaha UMKM dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan mengenai penghindaran dan penggelapan pajak. Penelitian ini juga diharapkan mampu mengeksplorasi pendapat-pendapat dari informan untuk dapat menghasilkan kesimpulan berupa alasan-alasan apa saja yang dapat mendukung sikap etis menghindari dan menggelapkan pajak.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah pada persepsi wajib pajak khususnya pengusaha UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Pacitan. Persepsi tersebut berhubungan dengan sikap etis mereka mengenai praktik penggelapan pajak yangmana penggelapan pajak ini diasumsikan bisa dilakukan oleh siapa pun berdasarkan alasan tertentu. Alasan-alasan tersebut itulah yang akan digali lebih lanjut oleh peneliti mengapa penghindaran dan penggelapan pajak bisa menjadi etis untuk dilakukan.

## **C. Pemilihan Lokasi dan Situs Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Pacitan, dimana Kabupaten Pacitan sendiri masih merupakan daerah yang tergolong kurang berkembang sehingga diharapkan dapat memberi suatu gambaran bagaimana persepsi pengusahanya mengenai penghindaran dan penggelapan pajak jika kondisi lingkungan yang ada tidak terlalu mendukung untuk diadakannya perputaran uang dalam jumlah besar.

Kondisi dari keadaan ekonomi di Kabupaten Pacitan dirasa bisa mempengaruhi sikap etis para pengusahanya untuk menghindari atau menggelapkan pajak. Keterbatasan sumber daya manusia dan modal mengakibatkan usaha tidak terlalu bisa berkembang layaknya di kota-kota besar. Kebutuhan dana untuk mempertahankan usahanya harus diatur sedemikian rupa supaya sisi pengeluaran tidak terlalu besar. Sedangkan beban pajak akan semakin besar jika harus menggunakan tarif PPh Final PP No. 46 karena tarif pajaknya

tunggal dan tidak progresif dapat merugikan wajib pajak yang memiliki penghasilan kecil.

#### D. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah subyek dari mana dapat diperoleh sumber data berupa benda, proses, responden, dokumen, dan catatan-catatan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### 1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber yang langsung berkaitan dengan tujuan penelitian, seperti informan yang mempunyai keterkaitan dengan fokus penelitian, yaitu berupa kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang diamati dan diwawancarai. Data primer diperoleh dengan wawancara dengan enam pengusaha dari pelaku usaha kecil terkait dengan masalah yang diteliti menggunakan teknik *snowball sampling*. Sedangkan dari sisi pemerintah akan dipilih dari kepala KP2KP Kabupaten Pacitan untuk mendapat informasi atau gambaran mengenai perilaku ketidakpatuhan yang bisa dilakukan oleh pengusaha di Kabupaten Pacitan.

##### 2. Data Sekunder

Karena pada dasarnya penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak hanya mengandalkan pada satu jenis sumber data, maka diperlukan juga sumber data sekunder berupa dokumen guna mendukung keabsahan data primer. Data sekunder didapat dari pihak ketiga yang menyediakan tambahan informasi mengenai subjek maupun objek yang diteliti. Data sekunder pada penelitian

adalah berupa dokumen tentang daftar para pengusaha UMKM di Kabupaten Pacitan dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, data kepatuhan Wajib Pajak berdasarkan pelaporan SPT dan pembayaran pajak penghasilan tahun 2013-2016 dari KPP Ponorogo serta catatan pribadi oleh peneliti berupa hasil observasi yang dilakukan pada wilayah dan objek penelitian.

### **E. Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### **1. Observasi**

Observasi merupakan kegiatan peneliti mencatat sikap dan aktivitas individu pada situs penelitian (Creswell, 2009: 181). Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal. Observasi digunakan untuk mendapat hasil diskripsi bagaimana gambaran sikap wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak, terkait dengan sukarela kepatuhan. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap keadaan yang berhubungan dengan objek penelitian di lingkungan Kabupaten Pacitan.

#### **2. Wawancara**

Wawancara bisa dilakukan dengan empat cara yaitu: tatap muka, satu per satu; melalui telepon; tatap muka dalam satu kelompok; dan melalui surat

elektronik menggunakan jaringan internet (Creswell, 2009: 179). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tatap muka dengan masing-masing informan. Jadi secara bergantian peneliti akan mendatangi setiap informan pada waktu dan tempat berbeda. Wawancara tatap muka mempunyai kelebihan dibandingkan wawancara melalui telepon dan teknik kuisioner, yaitu teknik ini lebih memungkinkan pewawancara untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan dan menggali informasi lebih dalam. Teknik ini juga memungkinkan responden untuk lebih memahami mengenai maksud penelitian yang dilakukan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bentuk dokumen publik yang didapat dari instansi atau dinas terkait. Sebelum melakukan wawancara, dokumen-dokumen ini lah yang akan memberikan gambaran tentang subjek dan objek penelitian. Ketika melakukan rangkaian penelitian, juga dilakukan pendokumentasian sehingga dapat memudahkan peneliti mendiskripsikan pelaporan hasil penelitian.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu dalam melakukan penelitian yaitu untuk mengumpulkan data secara terancang. Pada penelitian ini, peneliti bertindak sebagai *human instrument* yang bertindak menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.



Observasi dilakukan dengan mencatat informasi yang sekiranya diperlukan selama melakukan pengamatan pada objek penelitian. Untuk mendukung kegiatan observasi, diperlukan instrumen lain guna memudahkan peneliti mengumpulkan data yang diperlukan. Komponen-komponen instrumentasi tersebut antara lain (Creswell, 2009: 182-183):

1. Daftar pedoman wawancara, yang digunakan sebagai kerangka atau acuan dalam wawancara atau pengajuan pertanyaan secara langsung dengan informan yang terkait dengan penelitian.
2. Alat-alat tulis dan buku catatan, yang digunakan untuk mencatat hasil wawancara dan hasil pengamatan atau pemikiran sewaktu mengamati suatu kejadian selama penelitian.
3. Alat rekam, digunakan untuk merekam tanya jawab yang dilakukan antara peneliti dengan informan.

Ketika melakukan wawancara juga perlu memperhatikan hal sebagai berikut (Creswell, 2009: 183):

1. Waktu, tempat, informan, dan pewawancara;
2. Instruksi yang harus diikuti oleh pewawancara sehingga ada standar yang bisa digunakan untuk wawancara selanjutnya;
3. Penyusunan pertanyaan dimulai dari basa-basi (*ice-breaker*) diikuti 4-5 pertanyaan seputar masalah yang diteliti, dan kemudian penyampaian kesimpulan atau pertanyaan lanjutan;

4. Pertanyaan secara mendalam sebanyak 4-5 pertanyaan guna menanyakan kepada informan mengenai detail ide-ide mereka atau untuk mengembangkan pernyataan-pernyataan yang telah mereka kemukakan sebelumnya;
5. Jeda antara pertanyaan untuk merekam respon;
6. Pemberian ungkapan terima kasih untuk mengapresiasi waktu yang telah diberikan oleh informan selama wawancara.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dilakukan pada saat bersamaan ketika penelitian dilakukan dengan pemahaman mendalam yang berkelanjutan terhadap data yang telah diperoleh, menganalisis, dan melakukan pencatatan selama proses penelitian berlangsung (Creswell, 2009). Hasil analisis data pada penelitian ini dilaporkan dalam bentuk tulisan naratif.

Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan teknik analisis data pada penelitian ini (Creswell, 2009: 183-190):

1. Mengumpulkan dan mempersiapkan data yang akan dianalisis, dengan mengumpulkan semua catatan serta mengubah hasil rekaman wawancara dari alat rekam ke dalam bentuk tulisan yang kemudian disebut transkrip wawancara.
2. Membaca keseluruhan catatan yang dilakukan selama melakukan penelitian untuk mendapatkan gambaran umum tujuan penelitian sikap etis pengusaha UMKM mengenai penghindaran dan penggelapan pajak.

3. Memulai menganalisis data dengan membuat *coding* pada informasi yang bersifat umum dari hasil wawancara dengan pengusaha UMKM, kemudian mengkategorisasikan kumpulan informasi yang sama dalam satu topik.
4. Menggunakan *coding* untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail pemikiran pengusaha UMKM mengenai penghindaran dan penggelapan pajak pada kondisi dan situasi tertentu. Kemudian menghubungkan hasil informasi dengan hasil wawancara dengan pihak pemerintah serta mengaitkannya dengan teori-teori yang telah dikumpulkan sebelumnya dalam penelitian ini.
5. Menyempurnakan bagaimana hasil diskripsi dan tema akan dapat direpresentasikan pada naratif kualitatif dengan merangkai narasi dari hubungan-hubungan yang ada pada kategori yang telah diurai sebelumnya.
6. Menyusun kesimpulan. Akhir dari menganalisis data melibatkan dengan interpretasi hasil temuan dalam bentuk diskripsi singkat berupa kesimpulan. Serta akan menjawab secara singkat rumusan permasalahan dari penjelasan sebelumnya tentang sikap etis penghindaran dan penggelapan pajak dari sudut pandang pengusaha UMKM di Kabupaten Pacitan, sehingga kemudian bisa memberikan pengetahuan baru tentang hal tersebut.

#### H. Pengujian Kredibilitas Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan dengan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa

yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti dimana kebenaran realitas data tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya.

Untuk menguji apakah penelitian penulis dapat dipercaya kredibilitasnya, dilakukan pengujian kredibilitas data atau kepercayaan atas hasil penelitian sesuai teori yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif, antara lain dengan dilakukan triangulasi dan *member check* (Creswell, 2009).

#### 1. Triangulasi

Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu dengan menganalisis hasil penelitian dari wawancara, observasi, jurnal, dan dokumen pribadi berupa catatan lapangan. Dengan memiliki informasi yang didapat dari berbagai sumber, peneliti dapat membandingkan data yang satu dengan yang lainnya untuk mendapat hasil penelitian yang valid dan lebih mendalam. Dalam hal ini sikap etis tentang penghindaran dan penggelapan pajak akan dianggap valid apabila informan bisa memberikan perspektif yang sama pada satu kategori.

#### 2. *Member Check*

Pengujian kredibilitas *member check* dilakukan dengan cara mendiskusikan kembali data-data yang diperoleh peneliti dengan sumber-sumber data yang telah memberikan data. Hal ini dilakukan dengan melakukan *follow-up* pada informan pada kunci penelitian untuk memberikan masukan terhadap laporan penelitian yang telah dilakukan guna mendapatkan akurasi data.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Pacitan

###### a. Kondisi Geografis dan Demografis

Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Pacitan yang terletak di ujung barat daya Provinsi Jawa Timur. Letaknya tepat berada pada koordinat  $110^{\circ} 55'$  –  $111^{\circ} 25'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 55'$  –  $8^{\circ} 17'$  Lintang Selatan dengan luas 1.389,87 km<sup>2</sup>. Secara administratif Kabupaten Pacitan terbagi menjadi 12 Kecamatan dengan 159 Desa dan 5 Kelurahan. Wilayahnya berbatasan dengan kabupaten Ponorogo di utara, Kabupaten Trenggalek di timur, Samudra Hindia di selatan, dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) di barat. Sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan kapur, yakni bagian dari rangkaian Pegunungan Kidul sehingga tanahnya menjadi kurang cocok jika dijadikan lahan pertanian.

###### b. Pariwisata dan Perekonomian

Meskipun tidak terlalu menonjol pada bidang pertanian, Pacitan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi sumber daya alam besar di bidang perikanan dan pariwisata karena berbatasan langsung dengan wilayah laut dengan pantainya yang landai. Meskipun laut selatan tersebut masih terkenal dengan ombaknya yang ganas, pantai-pantainya masih menawarkan keindahan estetikanya terutama di saat air laut surut. Saat ini hanya ada satu pantai yang dikelola oleh pihak swasta yaitu Pantai Teleng Ria yang terletak 4 km dari pusat



kota, sehingga fasilitas yang disediakan cukup memadai. Sedangkan untuk pantai yang lain, masih dikelola oleh daerah atau warga setempat dengan keadaan yang jauh berbeda dari Pantai Teleng Ria, dimana fasilitas yang tersedia hanya seadanya serta sebagian besar jalannya belum bisa diakses menggunakan bus besar.

Sebutan lain Pacitan adalah Kota 1001 Goa karena di wilayah tersebut banyak tersebar wisata goa, meskipun sebagian besarnya tidak dibuka untuk umum karena tempatnya yang cukup berbahaya untuk dimasuki tanpa pendamping dan peralatan yang memadai. Namun beberapa bisa dijadikan wisata karena telah dilengkapi keamanan dan fasilitas yang terus ditingkatkan. Bahkan salah satu goa yang ada telah dinyatakan sebagai Goa terindah se-Asia Tenggara karena keunikan stalaktit dan stalakmit yang membentuknya.

Banyaknya goa-goa yang ada serta jajaran pegunungan kapur yang ada di Pacitan, membuat tempat ini sering dijadikan lokasi penelitian sejarah serta geopark. Mulai dari kehidupan manusia purba hingga umur, jenis, dan asal-usul bebatuan, yang mana keduanya tidak bisa dipisahkan karena pada masa jaman pra-sejarah batu merupakan unsur penting dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini telah didirikan suatu bangunan tempat penyimpanan benda-benda bersejarah tersebut, namun sayangnya masih belum dikelola baik sehingga kurang diminati oleh masyarakat banyak.

Selain wisata pantai, wisata goa dan wisata sejarah, ada satu wisata alami yang telah dikelola baik oleh pemerintah daerah dengan berbagai fasilitas penunjangnya. Wisata tersebut adalah Pemandian Air Hangat Tirtohusodo yang

berada di Kecamatan Arjosari, sekitar 15 km dari pusat kota ke arah utara. Air disini berasal dari kaki gunung kelir dengan air Panas Alami yang sumbernya merupakan belerang murni.

Banyaknya tempat wisata, menjadikan banyak munculnya industri rumahan yang mengolah hasil perikanan untuk dijadikan oleh-oleh khas Pacitan. Industri ini yang paling banyak berkembang saat ini. Bahkan hasilnya tidak hanya dijual di dalam kota Pacitan saja tapi juga telah banyak didistribusikan hingga ke luar kota. Meskipun demikian, para pengusaha masih sering mengeluhkan mengenai keterbatasan bahan baku untuk bisa memenuhi permintaan pasar. Sedangkan untuk bahan baku sendiri, mereka masih mengandalkan hasil industri dan perikanan lokal.

Kegiatan perindustrian di Kabupaten Pacitan tidaklah banyak dan tidak terlalu besar. Beberapa diantaranya yang terkenal yaitu dua sentra industri rokok dengan merek berbeda, pabrik timah dan *woodboard* di daerah Arjosari, pabrik triplek di Widoro, dan juga Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan daya 2 x 315 MW yang berlokasi di Teluk Bawur, Sudimoro.

Total dari sektor koperasi dan UMKM di Kabupaten Pacitan berjumlah 22.233 unit, namun sebaran usaha yang ada masih banyak berkisar pada skala usaha mikro dan kecil. Dari penggolongan usaha kecilnya pun juga jika ditelusuri lebih dalam lagi, lebih banyak didominasi oleh pemilik yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Heterogenitas jenis usaha tidak terlalu banyak seperti pada kebanyakan kota/kabupaten lain. Hal tersebut dikarenakan tingkat daya beli

masyarakatnya yang rendah serta keterbatasan sumber daya yang kurang mampu memenuhi permintaan pasar jika harus melakukan pemekaran usaha ke luar kota.

## **B. Penyajian Data**

Penyajian data dilakukan berdasarkan kode-kode khusus yang telah disesuaikan dengan tema dan sub-tema yang dihubungkan dengan rumusan masalah. Kode-kode tersebut dibuat dengan maksud untuk mempermudah analisa data penelitian supaya lebih fokus dan terarah. Penyajian data mengenai sikap etis penghindaran dan penggelapan pajak pada UMKM di Kabupaten Pacitan akan dipaparkan dibawah ini.

### **1. Sikap Etis Pengusaha Kecil di Kabupaten Pacitan mengenai Penghindaran dan Penggelapan Pajak**

Sikap etis pengusaha kecil mengenai Penghindaran dan Penggelapan pajak dapat dibedakan antara yang mendukung dan tidak mendukung. Sikap ini pun dapat diukur dari tindakan, pengetahuan atau pemikiran maupun persepsi mengenai perilaku ketidakpatuhan. Salah satunya para pengusaha menyebutkan bahwa mereka membayar pajak tidak secara bulanan, tetapi hanya setahun sekali, seperti yang dikatakan oleh para informan berikut,

“Kalau tiap bulan, tidak saya.. Iya benar. Sekali setahun. Pembayarannya seingat saya Februari atau Maret.. Ya kita mendekati periode batas waktu akhir pembayaran SPT”. (Informan I, lokasi di tempat usaha Informan I, 28 September 2017)

“Ini, setahun mbak.. tapi untuk tahun ini belum saya. Belum bayar.” (Informan V, lokasi di rumah Informan V, 02 Oktober 2017)

Selain hanya membayarkan pajaknya tidak pada setiap bulan, beberapa pengusaha juga menyebutkan bahwa bukan mereka sendiri yang mengurus administrasi perpajakannya, seperti yang dikatakan informan berikut ketika ditanya masalah pembayaran dan pelaporan pajak,

“Wah saya kurang kurang tau. Karena jujur saja saya juga tidak ada waktu buat bisa mempelajari banyak hal terutama pajak ini. Jadi kalo masalah administrasi pajak saya serahkan ke salah satu staf saya.” Informan II lokasi di rumah Informan II, 30 September 2017)

“Itu nggak... itu biasanya yang menghitung dari perpajakan. Namun, gimana ya, dari saya itu tiap tahun bayar pajak. Itu ada di kantor pajak.” (Informan III, lokasi di rumah Informan III, 02 Oktober 2017)

“Itu yang tak suruh ngurusi karyawan saya. Kalo.. kalo itu gak ngurusi saya, tapi ya ngerti dikit-dikit saya.” (Informan VI, lokasi rumah Informan VI, 04 Oktober 2017)

Dalam perhitungan usaha, pengusaha-pengusaha ini mengaku hanya menghitung pendapatannya secara rata-rata dengan pencatatan sederhana, hal tersebut kemudian juga berimbas pada perhitungan pajaknya, juga ada yang didelegasikan ke orang lain, seperti yang diungkapkan informan berikut ketika ditanya tentang bagaimana tata cara perhitungan omzet juga pengenaan tarif pajaknya:

“Ya metode brutonya itu jadi hanya perkiraan aja. Jadi misalkan setiap sebulan kita, penghasilannya sekian, kemudian untuk beban operasional besarnya sekian, dan nanti kita kalkulasi selama setahun atau 12 bulan baru nanti akan diperoleh berapa penghasilan yang kena pajak. Seperti itu.. Kemaren itu kalau tidak salah dari petugas pajak itu kena yang 1%” (Informan I, lokasi di tempat usaha Informan I, 28 September 2017)

“Ada petugasnya. Ya seharusnya saya. Memang ini, kalo perusahaan tidak mampu mengangani sendiri kan harus ada pembantu-pembantunya. Walaupun toh sekarang ini didelegirkan kepada orang lain, tidak lepas dari pengawasan saya. Iya, tapi kan cuma rata-rata. Soalnya kan setiap hari berbeda. Hasil saya hari ini dengan besok sudah lain. Ya secara rata-rata aja.” (Informan III, lokasi di rumah Informan III, 02 Oktober 2017)

“Iya satu persen. Katanya sana, olahan, kan gak tentu ya mbak. Kalo saya namanya juga orang dagang kan gak tentu tiap bulan, akhirnya cari yang minimal aja bu..” (Informan V, lokasi di rumah Informan V, 02 Oktober 2017)

“Ya kalo saya terus terang, *gak tau* pembukuan sini, pengelolaan keuangan sini, gak ada. Saya hanya kira-kira aja biasanya. Tapi kita memang.. ya kita mau lah bayar sebenarnya, tapi kan kalo kita sebenarnya lebih banyak ke proyeknya pemerintah, lebih banyak sudah dibayar oleh pihak ketika proyek itu, pencairan, otomatis kan..” (Informan VI, lokasi rumah Informan VI, 04 Oktober 2017)

Sikap etis wajib pajak mengenai ketidakpatuhan dalam membayar atau pun melaporkan yang diwujudkan dalam bentuk tindakan para informan bersangkutan, seperti berikut dikatakan beserta alasannya,

“Kalau melakukan.. gimana ya, nyatanya dari petugas perpajakan juga gak ada masalah. Artinya kalau dikatakan penghindaran, mungkin nilai nominal dari penghasilan yang saya sampaikan di SPT sama beban yang saya sampaikan di SPT mungkin itu tidak, eeh belum, bukan tidak, belum menunjukkan angka yang sebenarnya. Nah apakah ini dikatakan sebagai penghindaran saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas, mungkin angka-angka yang saya berikan itu belum menunjukkan angka-angka yang riil.”

“Ya karena alasannya itu, karena saya kan tidak membuat laporan keuangan setiap bulan. Jadi angka-angka yang saya masukkan di SPT itu hanya estimasi saja. Perkiraan. Jadi misalkan penghasilan sebulan, ee apa, penghasilan sebulan sekian. Kemudian beban sebulan sekian. Kemudian selama setahun akan ketemu sekian. Nah seperti itu, jadi berdasarkan estimasi-estimasi saja.”

“Kalau alasan yang lain, kok gak anu ya. Sepengetahuan gini lho. Jadi kalau untuk laporan keuangan itu memang hanya bersifat untuk intern saya, kemudian kalau untuk urusan dalam hal ini pajak, memang yang saya sampaikan disini kadang memang bisa lebih bisa kurang dari catatan saya. Gitu ya.” (Informan I, lokasi di tempat usaha Informan I, 28 September 2017)

“Jangankan pajak, yang itu aja sudah.. makanya sedih. makanya akhirnya saya berpikir, bekerja yang satu tidak menjual kepada pemerintah, bekerja yang tidak bersinggungan dengan pajak. Kan aman mbak kita. Ibarat kita itu sewaktu-waktu di.. apa itu, didepak, kita kan sudah mandiri. Nah itu. Tidak bergantung dengan pemerintah, tidak dengan pajak. Ya ..... . itu yang kadang menyusahkan kita sebagai orang swasta, padahal banyak yang menggantungkan hidupnya dari kita.”



“Makanya kita jangan sampe maju-maju gitu usahanya. Iya hehe.. taunya kita minus aja sudah. Kalo minus kan diaudit seperti apa pun kan tetep kita minus. Yang penting cukup buat makan, buat minum, cukup buat bayar listrik. Ya karena ketakutan tadi itu. Orang ketakutan kan tau sendiri to mbak, makan enak jadi gak enak, tidur pulas, jadi gak tidur pulas, bahkan gak bisa tidur. Ketakutan itu kan mengajari biar bagaimana kita nggak takut, ya kita gak berhubungan dengan lingkungan itu. Lingkungan apa, ya lingkungan pajak. Bagaimana caranya menghindar dari pajak. Ya itu yang selama ini harus menjadi pajak kita menjadi bagaimana kita bekerja tanpa harus membayar pajak itu tadi. Kan ada batasan omzet sekian tidak harus bayar pajak. Yaudah kita kerja kecil-kecil aja hehe.” (Informan II, lokasi di rumah Informan II, 30 September 2017)

“Oh itu setiap tiga bulanan sekali kesininya (Petugas Pajak). Hanya bawa berkasnya, sudh diisi, saya tinggal tanda-tangan. Ya Alhamdulillah banyak dibantu. Mungkin dari dinas hal semacam itu gak boleh, tapi ya mau gimana lagi.” (Informan III, lokasi di rumah Informan III, 02 Oktober 2017)

“Yang berkaitan dengan usaha, ya kalo narik, pas.. ya bank.”  
“Padahal gak pernah menyetorkan laporan penghasilan itu, gak pernah setor. Pajak penghasilan itu kalo bisa ditekan seminim mungkin kok. Penghasilan sejuta ya bilanganya tiga ratus, dua ratus, gitu kan..”  
“Penghasilan sejuta gak mungkin kan ngomong dua juta. Kan nanti pajaknya besar.” (Informan IV, lokasi di rumah dan tempat usaha Informan IV, 02 Oktober 2017)

“Belum ada anu juga sih.. kan biasanya ada tagihan, ini ndak ada.” (Informan V, lokasi di rumah Informan V, 02 Oktober 2017)

“Seingetnya hehe. Jujur aja ya karena ya itu tadi. Karena kita sudah tidak telaten lah istilahnya. Jadi saya itu sering telat bayar pajak. Tapi ketika sudah ini, ini ada proyek yangharus ada laporan.. tiga bulan terakhir setahun terakhir. Nah kita baru ngurusi..”

“Ya sudah resiko. Memang kita belum bisa taat tentang pajak itu.”  
“Ya kalo saya, yaa itu kan sebenarnya bisa diakali itu tadi kan (pajaknya), kan bisa dimainkan di omzet. Itu, tapi kalo sini kan normatif ya, ini bisa gini-gini kan ada aturan.” (Informan VI, lokasi rumah Informan VI, 04 Oktober 2017)

Fungsi pajak merupakan perihal penting yang wajib diketahui oleh Wajib

Pajak meskipun hanya berupa pengetahuan umum, seperti yang dijelaskan oleh informan berikut,

“Ini secara teoritis, ini fungsi pajak ada teori anggaran atau budgetair. Itu yang saya tau, yang lain-lain saya kurang tahu. Itu secara teoritis. Jadi hanya fungsi anggaran atau budgetair atau fungsi mengatur mungkin gak salah kalo itu, tapi setahu saya yang saya ingat sampai sekarang ya fungsi anggaran itu aja.” (Informan I, lokasi di tempat usaha Informan I, 28 September 2017)

Sedangkan jawaban yang diberikan oleh informan lain seputar pengetahuan pajaknya adalah sebagai berikut,

“Karena pajak memang seperti itu mbak, yang jelas pajak itu gak banyak kan kejelasannya.. beda dengan departemen lain yang njlimet (rumit dan banyak). Ya cuma memang kalau saya repot, yang mengurus ya dari dinas perpajakannya.” (Informan III, lokasi di rumah Informan III, 02 Oktober 2017)

“Pajak penghasilan itu gak tau gimana caranya, pokok saya, mungkin diambil dari pinjaman bank kayanya.”  
“Ya ditarikkan penghasilan dari situ. Berapa persen gitu. Lah nyatanya langsung ditarik gitu.” (Informan IV, lokasi di rumah dan tempat usaha Informan IV, 02 Oktober 2017)

“Saya kemaren gak terlalu detail untuk ngurus apa-apa, ya yang penting.. karena kemaren katanya wajib kan. Yang punya penghasilan harus.. NPWP.. kepetulan setiap ada pelatihan-pelatihan ke luar kota itu juga harus punya NPWP. Yah sudah ngurus.. bapaknya, wes berapa sih bu bayarnya ya diurus aja. Akhirnya kita kesana yang ngitungin juga orang sana.” (Informan V, lokasi di rumah Informan V, 02 Oktober 2017)

“Sebenarnya pajak itu juga bagus lo. Kita itu juga menyadari pajak itu memang komplit tetapi permasalahannya kita itu kadang nggak mau ribet gitu lho. Saya lebih *demen* (senang) kalo ada pihak ketiga. Misalnya ada semacam konsultan atau biro yang mau ngurus pajak itu saya malah senang. Jadi intinya kita gak mau ribet aja, bukan masalah gak mau bayarnya.” (Informan VI, lokasi rumah Informan VI, 04 Oktober 2017)

Selain menilai dari tindakan Wajib Pajak dalam manajemen pajaknya, penting juga untuk mengetahui pendapat mereka mengenai penghindaran atau penggelapan pajak. Disini akan terlihat bagaimana setiap pengusaha akan mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Berikut yang disampaikan oleh para

pengusaha ketika ditanya mengenai pernah tidaknya mendengar mengenai penghindaran dan penggelapan pajak,

“Pernah. Kalau di media-media itu sering terdengar kata-kata itu, penghindaran sama penggelapan.”

“Kalau penggelapan itu memang jelas meniadakan pajak, tapi kalau penghindaran ini sebetulnya yang bersangkutan membayarkan pajak namun tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Mungkin seperti itu ya konsepnya.” (Informan I, lokasi di tempat usaha Informan I, 28 September 2017)

Informan I juga mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan penghindaran dan penggelapan pajak yang masih dilakukan oleh banyak Wajib pajak, berikut pernyataannya,

“Ya kalau masalah perasaan jelas dalam hal ini kan tidak adanya keadilan. Kan gitu to. Kan pajak itu kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia khususnya. Kan kita harus mematuhi juga. Bahkan secara pribadi sebetulnya saya pun misalkan tidak punya NPWP ternyata juga toh gak gak diminta sama perpajakan, tapi saya secara pribadi mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan sebetulnya NPWP itu pun juga tidak ada maksud apa-apa, tidak ada benefit apa-apa yang saya peroleh. Misalkan kemudahan saya mendapatkan kredit, kemudahan saya untuk mendapatkan dana-dana yang lain dari instansi pemerintah yang lain, nyatanya juga tidak. Jadi ini hanya inisiatif saya sendiri untuk mendapatkan NPWP dan itu murni tidak terkait dengan pihak-pihak manapun.”

“Ya jelas, jelas. Ya itu jelas merugikan. Artinya pemasukan pemerintah, pemasukan negara dari pajak kan secara otomatis tidak sesuai dengan yang diinginkan, dan yang di dapat oleh pemerintah juga tidak sesuai dengan kenyataan apalagi dengan proses penghindaran dan penggelapan gitu lho.” (Informan I, lokasi di tempat usaha Informan I, 28 September 2017)

Sedangkan pengusaha lain terlihat memiliki sikap yang positif mengenai penghindaran dan penggelapan pajak, berikut pernyataannya,

“Kalau bisa bekerja tidak bayar pajak, bagaimana caranya tidak melanggar hukum. Ya udah kerja yang kecil-kecil aja yang tidak... yang penting cukup. Sekarang, ya saudara-saudara saya sekarang bagaimana kerja tidak usah pajak. Kalo maju pun ya percuma. Kita tetap diburu.. kita aktif juga dicari kesalahannya, apalagi gak aktif, gitu lho. Jadi konyol, gitu lho hehe..” (Informan II, lokasi di rumah Informan II, 30 September 2017)

“Ya itu kan memanfaatkan peluang.”

“Data yang tidak otentik, yang dilaporkan jelasnya seratus tapi hanya dilaporkan lima puluh. Namun si pelapor sendiri juga gak bisa disalahkan, masalahnya saya tadi kan sudah bilang, hasil saya sekarang sama besok sudah lain. Terus masa setiap hari dihitung kan juga tidak mungkin..” (Informan III, lokasi di rumah Informan III, 02 Oktober 2017)

“Ya.. gini ya. Terus terang aja, itu kalo mbaknya survey, pengusaha-pengusaha itu rata-rata laporannya dobel.”

“Maksudnya laporan dobel itu ke pembukuannya. Pembukuan sendiri sama pembukuan pajak itu beda.”

“Jadi laporan pembukuan yang sebenarnya dengan laporan pembukuan pajak itu beda.” (Informan VI lokasi rumah Informan VI, 04 Oktober 2017)

Untuk mengetahui keadaan sebenarnya secara umum sikap etis wajib pajak mengenai penghindaran dan penggelapan pajak, peneliti juga meminta konfirmasi dari pihak KPPKP Kabupaten Pacitan. Hal tersebut berhubungan dengan kesadaran WP dalam melaksanakan pembayaran dan pelaporan kewajiban pajaknya.

“Kalau lapor sih, pengusaha yang besar sih mereka sudah sadar ya kewajibannya ini ini udah tahu. Soalnya tiap transaksi yang mereka lakukan, terutama yang pengusaha kena pajak ya, nah PKP yang bisa mengeluarkan faktur pajak itu kan mereka sudah punya kewajiban sendiri. Jadi kalau misalnya aa dia kan punya kewajiban untuk melakukan *e-faktur* faktur, nah faktur pajak itu dikeluarkan nomornya itu bisanya kan apabila mereka melapor secara patuh. Jadi laporan tiap bulan ada terus PPN -nya. Dan mereka disitu sudah tau sebenarnya. Jadi kalau memang yang patuh enggakya itu kebanyakan memang pengusaha-pengusaha yang aa kaitan usahanya itu, berkaitan dengan faktur, contohnya itu. Kebanyakan itu, tapi kalau pengusaha-pengusaha biasa sih sebenarnya patuh sih patuh, cuma kadang kalo pembayaran itu kan harusnya tiap bulan, mereka bayar, iya kan, tapi kadang mereka ngrapel. 6 bulan sekali kesini, bayar 6 bulan sekaligus, yang kemaren-kemaren.”

“Sebenarnya sih bisa (penghindaran), cuma di negara kita itu menganut sistem *self assessment* yang dimana wajib pajak aa apa namanya menghitung sendiri, kemudian membayar, melaporkan sendiri kan, jadi kami percaya kepada mereka. Hehe. Intinya itu. Jadi ya sebenarnya ya kami tahu, kalo misalnya pembayaran PP 46 itu sebenarnya tidak semuanya, saya bilang tidak semuanya ya, tapi ada beberapa yang tidak



jujur. Ada yang jujur, ada yang enggak, tapi tidak semuanya jujur gitu.” (Afriandita, lokasi KPPKP Pacitan, 24 Oktober 2017)

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil di Kabupaten Pacitan Bisa Memiliki Sikap Etis untuk Menghindari dan Menggelapkan Pajak**

Berbagai alasan bisa dikemukakan oleh Wajib Pajak mengapa tindakan untuk menghindari dan menggelapkan pajak bisa dinilai etis untuk dilakukan atau tidak. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang paling sering dihubungkan dengan ketidakpatuhan adalah mengenai sistem perpajakan di Indonesia. Berikut adalah pernyataan informan yang menyatakan bahwa sistem pajak di Indonesia sudah berjalan dengan baik,

“Sudah baik, berjalan sesuai dengan aturan dan kita sebagai WP sudah merasakan, merasakan manfaatnya atas sistem perpajakan yang dijalankan.” (Informan I, lokasi di tempat usaha Informan I, 28 September 2017)

Undang-Undang Perpajakan merupakan sub-bagian paling dasar dari sistem perpajakan di Indonesia yang juga berhubungan langsung dengan hukum pajak. Namun, ada pengusaha yang merasa kurang diuntungkan dengan Undang-Undang yang ada sekarang berkaitan dengan pelaksanaannya. Berikut pernyataannya,

“Karena saya juga orang muda, saya melawan itu, saya mencari ya mohon maaf ini, mencari bagaimana usahanya tidak berdampak kena pajak gitu, bersinggungan dengan pajak. Karena hal itu yang bisa kita sewaktu-waktu jatuh. Sewaktu-waktu mbak. Sekarang mbak, contoh, kita itu tinggal di tuban, di tempat ini. Nah penghasilan saya mungkin, kalaulah satu bulan satu juta. Pemerintah dengan kebutuhannya yang sedemikian rupanya, tadinya bayar pajak saya itu dalam satu bulan itu, bayar pajak tanah ya, PBB itu kalaulah satu bulan itu sepuluh ribu atau seratus ribu, dinaikkan menjadi tga ratus persen, berarti kan seratus dikali tiga, tiga ratus ribu.



Sedangkan kebutuhan lainnya kan (juga meningkat). Padahal kan itu undang-undang. Iya kan.”

“Lah makanya saya mau buat kesimpulan ini, jadi saya menghindari pajak, hati-hati dengan pajak. Kalau bisa dibantu, patuh, tetapi jangan sampai kita jatuh. Sebetulnya pajak itu kan sederhana loh mbak, kalau toh apa, pelaksanaannya itu bener. Pajak itu kan sifatnya kan untungnya berapa, ya, untung itu yang dipersenkan. Tetapi, kenyataannya tidak mbak. Kenyataannya tidak. Jadi kalau dianggap dia kurang bayar, dicari-cari. Loh kamu kok beli bisa mobil, beli bisa ini, bisa tanah, bisa ini. Yah itu. Kalau semua itu dilaporkan, ya kalo tahun kemaren, kalo tahun ini kita laporkan sesuai adanya, lah kalo tahun besok kita keuntungan ndak segitu mbak, taulah hari ini kita bayar sepuluh juta dari keuntungan, besok namanya ekonomi kan gak pasti, sepi, lah bila kalau kita bayar dibawah sepuluh ndak boleh. Harus nambah..” (Informan II, lokasi di rumah Informan II, 30 September 2017)

Unsur kedua yang ada dalam sistem perpajakan adalah terkait kebijakan.

Kebijakan ini yang akhirnya bisa mempengaruhi Wajib Pajak melakukan kewajibannya karena merupakan syarat untuk memenuhi urusan lain terutama pada keharusan untuk ber-NPWP. Misalnya seperti yang diungkapkan oleh informan berikut:

“Yang berkaitan dengan usaha, ya kalo narik, pas.. ya bank.”

“dipotong. Iya. Soalnya persyaratan NPWP itu kan harus ada, tiap bidang keuangan.” (Informan IV, lokasi di rumah dan tempat usaha Informan IV, 02 Oktober 2017)

“NPWP punya sendiri karena kemaren kalo ada pelatihan kalo ada kepengurusan apa-apa, bantuan kemana kan harus punya NPWP sendiri. NPWP perusahaan juga ada, karena kemaren saya ngurus badan hukum harus, perusahaan harus punya.” (Informan V, lokasi di rumah Informan V, 02 Oktober 2017)

Sedangkan kebijakan berupa perubahan tarif normal ke tarif khusus dinilai oleh pengusaha lebih menguntungkan bagi pemerintah. Berikut penjelasannya,

“Kalau masalah menguntungkan sebetulnya memang kalo menguntungkannya jelas ini adalah menguntungkan pemerintah karena PKP-nya, penghasilan kena pajaknya, otomatis lebih besar. Artinya masyarakat sebagai wajib pajak sebagai pihak yang membayar kena bebannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebelumnya ada

penghasilan tidak kena pajak dan sebagainya itu kan, bisa lebih rendah.“ (Informan I, lokasi di tempat usaha Informan I, 28 September 2017)

Unsur yang tak kalah penting dalam sistem perpajakan adalah administrasi, yang merupakan satu kesatuan dalam melakukan pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penagihan pajak. Administrasi perpajakan harus dirancang sedemikian rupa supaya tidak memberatkan pihak-pihak yang melaksanakannya, baik wajib pajak maupun petugas perpajakan. Berikut adalah pendapat para informan berkaitan dengan administrasi pajak, termasuk juga mengenai petugas pajak,

“Kalau sistem sudah, yang namanya sistem itu baik. Nah kalo orang itu relatif. Seperti ini. Kalo sistem semuanya sudah baik, tinggal orangnya aja. Ya harapan kita sebagai masyarakat petugas pajak bisa melaksanakan sebaik-baiknya. Tapi sepertinya kalo sekarang sudah baik kok.” (Informan I, lokasi di tempat usaha Informan I, 28 September 2017)

“Mestinya gak boleh (diurus petugas pajaknya), tapi saya orang biasa gak mampu, melaksanakan itu gak mampu, jadi beban.” (Informan III, lokasi di rumah Informan III, 02 Oktober 2017)

“Saya itu juga bingung, yang mau saya bayarkan ini yang mana. Yang pribadi atau yang perusahaan ini. Kemaren yang dipake waktu di, apa, waktu pelatihan di Malang itu mintanya yang punyanya perusahaan. Sedangkan saya bayar NPWP perusahaan itu baru pertama kali pada waktu ada badan hukum itu, ngurus badan hukum itu.” (Informan V, lokasi di rumah Informan V, 02 Oktober 2017)

“Lah itu, teorinya (*self assessment*).. bagi orang-orang yang bikin teori itu kan orang-orang terpelajar ya. Orang-orang yang birokrat yang memang dia kerjanya pulpen sama kertas, atau kerjanya laptop ya. Tapi kalo orang-orang seperti saya yang jarang pegang komputer, jarang pegang laptop, jarang pegang pupen, males lah. Kita mau belajar itu sudah, sudah bingung gitu loh. Jadi ya.. kita sebenarnya belajar ya bisa, tapi sudah tidak telaten mau belajar itu. .... jadi kalo orang seperti saya mau belajar pajak, pikiranya sudah, wah ini saya ditunggu orang, oh ini saya harus ngecek karyawan disana, ini, sementara ini masih belum paham yang dimaksud ini. Kan aturan baru, banyak yang baru ya.”

“Gak.. saya, ketika beberapa kali itu jawabannya, maksud saya kan, saya kan butuhnya simpel ya, sudah ini enaknya gimana kan gitu, ketika

dijelaskan *ngalor-ngidul* (panjang lebar), wes gak hehe, terus males sekalian.”

“Lah saya dijelaskan gitu wes males gitu. Males. Makanya, saya kan maunya simpel aja. Sudah sini pajak saya berapa. Terus dibayar. Kan selesai.” (Informan VI, lokasi rumah Informan VI, 04 Oktober 2017)

Prinsip pemungutan pajak merupakan bagian dari sistem pajak yang juga harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan petugas pajak dalam melaksanakan tugasnya, sehingga tidak perlu ada keluhan perihal pemungutan pajak seperti yang dialami oleh informan berikut,

“Nah makanya ya itu. Tapi kalo kami membaca, makanya saya gak mau mempelajari pajak, karena saya pernah diperiksa oleh pegawai pajak itu, Bapak itu ngajari kita engga, belum sampe kita tahu, sudah ganti aturan lagi. Belum sempat tau, dan aturan lagi itu belum sempat disosialisai, Bapak sudah menyalahkan saya. Pak ....., gini loh pak, bapak itu salah ini. Loh.. ibarat bapak itu naik motor, belum sampe lampu merah, nah taunya lampu merahnya itu sekarang berubah wujud. Jadinya lampu merah itu jalan, lampu hijau berhenti. Padahal saya belum nyampe, aturan itu sudah dibuat. Lah bapak itu kan menjebak orang untuk berbuat salah. Lah padahal saya masuk kantor pajak tadi saya baca orang bijak taat pajak. Lah berarti bapak itu gak ngajari tapi orang itu diajak untuk menjadi anarkis, terhadap diri bapak, terhadap orang pajak, kalo gini caranya, bukan tadi pak. Coba Bapak jadi saya, Bapak ..... lagi anarkis karena Bapak tidak mampu bayar pajak disuruh bayar pajak. Gak mau bayar sekian, disuruh bayar sekian. Lah, mohon maaf, akhirnya kami diajak ke pemimpinannya, ini nyata ini, padahal saya puasa ini ya hehe, ya akhirnya deal-dealan. Bapak *butuhe piro wes*. Akhirnya *kong kalikong*. Lah akhirnya ngapain saya bayar pajak kalo begitu. Ngapain saya taat pajak kalo ketemunya saya suruh bayar ke pemerintah sekian, buat saya berapa. Separo-separo. Jadi hanya untuk alat getak. Ngapain saya bayar pajak. Lebih baik saya serahkan ke masjid, jelas nanti di akhirat untuk bekal mati. Lebih baik saya nggak bayar pajak, saya nginfak ke masjid, selesai. Mau dipenjara berarti saya jihad.”

“Nah itu, melihat keadaan yang kaya gitu sedih. Kita itu dikekang, dipaksa, diperes. Tapi yang sejahtera ya mereka-meraka itu. Kita melawan malah semakin dihabisi. Malah makin dihabisi. Ya *wallahu alam*. Kita harus ikhlas, tapi ya harus berbuat gitu lho, jangan hanya ya,.. ya cara membuatnya bagaimana caranya ya cari solusi. Yang murah kita bisa bertahan hidup, syukur-syukur kita bisa menyejahterakan yang lain, bisa bermanfaat bagi orang lain.” (Informan II, lokasi di rumah Informan II, 30 September 2017)

Faktor lain yang dinilai bisa mempengaruhi sikap etis pengusaha umkm terhadap penghindaran dan penggelapan pajak adalah persepsi mereka terhadap pemerintahan sekarang ini. Pendapat pengusaha tentunya bermacam-macam, ada yang bersikap positif, seperti yang dikemukakan oleh informan berikut,

“Kalau di Pacitan sudah. Jadi untuk kemanfaatan pajak dalam hal ini untuk misalkan pembangunan infrastruktur kemudian kualitas pendidikan, kemudian akses informasi, hubungan dengan kesejahteraan masyarakat, itu sudah berjalan dengan baik.”

“Kalau dibandingkan dengan kota lain, wah ini saya belum bisa menilai. Tapi kalau sebatas di Pacitan setidaknya dibandingkan dengan dulu-dulu dan dibandingkan dengan sekarang ya jelas lebih baik sekarang.” (Informan I, lokasi di tempat usaha Informan I, 28 September 2017)

Salah seorang informan yang merasakan langsung bantuan dari pemerintah, juga memiliki apresiasi yang positif karena mendapat bantuan dan pelayanan yang baik dari dinas lain berkaitan dengan usahanya, seperti yang dinyatakan berikut,

“Dari pemerintah ya.. oh macam-macam mbak. Penolongnya banyak sekali, salah satunya pengelolaan air limbah. Itu kan fatal, resiko tinggi. Itu dari dinas kesehatan membantu membuat kolam untuk saringannya. Tapi ya kalo untuk bisa menghasilkan residu yang benar-benar bersih tidak bisa, masih ada zat tertentu yang tertinggal. Dan satu-satunya solusi, limbah tadi harus dibuang sejauh-jauhnya dari pemukiman supaya tidak menyebar dan meresap ke tanah pemukiman. Soalnya kan bau juga itu hasil pembusukannya kalo ketemu dengan organisme hidup.” (Informan III, lokasi di rumah Informan III, 02 Oktober 2017)

Kebijakan pemerintah tidak lepas dampaknya pada ekonomi masyarakat, yangmana saat ini daya beli masyarakat dinilai menurun oleh informan. Berikut pernyataannya,

“Ya.. gimanya ya, saya gak terlalu mendetail kesana, yang penting urusan saya beres aja. Tapi jujur aja mengeluhnya temen-temen sekarang, perusahaan sekarang itu, gak semudah yang tiga empat lima tahun lalu. Semakin susah.”

“Ya pokoknya, kerjaan itu gak sebanyak yang dulu-dulu gitu”



“(penyebabnya) ya banyak hal lah, daya beli masyarakat, termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah kan banyak penghematan-penghematan yang.. iya kan” (Informan VI, lokasi rumah Informan VI, 04 Oktober 2017)

Dari informan yang sama, juga menyatakan bahwa beliau juga tidak mendapat bantuan langsung dari pemerintah. Berikut pernyataannya,

“Tidak. Tidak ada. Kita juga gak pernah ngajukan proposal- proposal gitu gak pernah. Ya kalo kerjaan dari pemerintah sih ya.. gak banyak tapi ada lah.” (Informan VI, lokasi rumah Informan VI, 04 Oktober 2017)

Dari kebijakan pemerintah juga mempengaruhi harga pokok penjualan yang saat ini menurun, berikut penjelasannya,

“Dari harga pokok ini kan turun semua. Dari pemerintahan Jokowi, pedagang \*\*\*\*\* ini gak pernah enak.”

“Menurun banget. Jaman SBY, kalo \*\*\*\*\* bisa lima ribu enam ribu, sekarang \*\*\*\*\* tiga ribu aja susah.”

“Gak ngerti ya.. masalahnya gini, kalo belanja \*\*\*\*\*, Jokowi ini kan mendatangkan impor dari Tiongkok”

“Itulah dampaknya ke pengusaha-pengusaha seperti saya. Makanya kalo sama-sama \*\*\*\*\* kalo dari Tiongkok ini ya kan masalah kualitas. *seumpama* orang masak, cuma kurang dtambahi micin itu udah jadi sayur. Kalo \*\*\*\*\* lokal ini kan harus nambahi ini itu, dan dari harga juga lebih rendah.” (Informan V, lokasi di rumah Informan V, 02 Oktober 2017)

Sedangkan ada pula informan yang bersikap kritis terhadap kinerja pemerintahan di Indonesia, seperti yang diungkapkan berikut,

“Lah iya. Uang pajak itu kan yang nyari orang swasta. Bagaimana bekerja yang tadinya sekian dapat untung sekian. Kan seperti itu. Pemerintah itu kan hanya menghabiskan. Taunya uang ada, gimana caranya dihabiskan. Kan gitu. Kerjaannya emang begitu. Makanya kita orang swasta itu mnghindari pajak, kalo bisa usaha bagaimana yang tidak membayar pajak sampai begitu. Karena bagi kami pajak itu menjebak gitu loh. Menjebak yang bikin tadi kita bisa menyejahterakan karyawan justru malah sebaliknya kita bisa mem-PHK karyawan. Ya itu yang sekarang ini era sekarang ini begitu. Tidak terus bagaimana pemerintah bikin nyaman swasta. Pemerintah bikin apa daya beli tinggi trus bagaimana pemerintah itu bikin masyarakat itu senang. Kan jauh dari itu hehe. Ini aja saya ngomong seperti ini sudah dianggap menjelekkan pemerintah, dianggap makar.”



“Akhirnya kita berpikir hidup di negara orang lain sekarang. Kita tidak diberikan fasilitas tapi kita disuruh memenuhi kewajiban. Sekarang contoh, misal listrik, listrik itu naik, adakah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

“Dasar hidup gitu loh. Karena kita sudah tercipta dengan listrik. Sekarang makan nasi aja pake listrik, iya kan. Mau berwudhu, sholat aja pake listrik. Lah itu dinaikkan. Nah otomatis kan buat bayar itu harusnya kesejahteraan dinaikkan, dengan cara apa, ya pemerintah paling pandai dalam hal itu. Tapi selama ini kan gak ada. Makanya kembali lagi pajak itu seperti, apa ya alat pembunuh hehe, yang tidak kelihatan. Makanya kemaren saya wah kalo gini terus, akhirnya saya.. aanu mbak kalo orang swasta itu sekarang gak usah maju. Kalo bisa ndak usah maju-maju tapi hanya cukup saja.” (Informan II, lokasi di rumah Informan II, 30 September 2017)

Faktor kesadaran perpajakan yang rendah bisa sangat mempengaruhi sikap informna terhadap ketidakpatuhan. Seperti pernyataan-pernyataan dari informan berikut,

“Makanya banyak yang swasta yang ketakutan, bukan berarti ndak mau membayar pajak, tapi ketakutan. Karena membayar pajak menjebak gitu lo.” (Informan II, lokasi di rumah Informan II, 30 September 2017)

“iya bayar.. lah kadang bayar pajak itu rugi kok..” (Informan IV, lokasi di rumah dan tempat usaha Informan IV, 02 Oktober 2017)

“Rata-rata seperti itu mbak. Rata-rata itu juga mereka bayar pajak itu terpaksa.” (Informan VI, lokasi rumah Informan VI, 04 Oktober 2017)

Bagi informan yang sadar akan perpajakan, tentunya juga bersikap lain mengenai praktik penghindaran dan penggelapan pajak. Berikut alasan yang informan berikan mengapa kesadaran pajak itu penting untuk dilakukan,

“Dorongan satu, yang jelas kita sebagai warga negara Indonesia ya kita memang harus patuh terhadap pajak dan yang kedua melihat fungsi pajak sebagai anggaran, negara gak mungkin akan berdiri tanpa disokong oleh pajak, itu gak mungkin. Gak ada negara yang bisa berdiri tanpa didukung oleh pajak gak mungkin. Jadi ya karena kita sebagai warga negara Indonesia ya secara otomatis salah satu bentuk pengabdian kita di bidang di sektor swasta ya salah satunya ya di pajak ini. Kita mau berkiprah di instansi pemerintahan gak bisa, tapi kita kan masih ada peluang membangun negara, salah satunya adalah dengan menjadi wajib pajak. Masalah itu nominalnya berapa yang penting kita secara pribadi sudah

menjadi wajib pajak yang baik.” (Informan I, lokasi di tempat usaha Informan I, 28 September 2017)

Ada juga informan yang berpendapatn bahwa sanksi pajak bisa dianggap sebagai hal yang menghambat dirinya untuk menjadi patuh, berikut penjelasannya,

“Makanya banyak yang swasta yang ketakutan, bukan berarti ndak mau membayar pajak, tapi ketakutan. Karena membayar pajak menjebak gitu lo.”

“Pidana (hukumannya). Dipenjara mbak. Seperti koruptor akhirnya. Lah kalo dipenjara itu kan secara hukum kita sudah terkena sanksi, belum moral, belum dampak ke anak, keluarga. Padahal hanya kita tidak tahu bagaimana menguasai pajak dengan benar. Kita semakin aktif, justru malah semakin terjebak. Kita bodoh juga terjebak. Nah akhirnya pajak itu momok akhirnya. Kalo bisa kita itu, ini masyarakat ini banyak yang berbicara kalo bisa jangan ber-NPWP malahan.” (Informan II, lokasi di rumah Informan II, 30 September 2017)

Lain halnya dengan faktor ketidaktahuan yang selalu menjadi alasan mengapa banyak wajib pajak yang belum bisa memenuhi kewajibannya, seperti yang disampaikan informan berikut,

“Ya cuma saya yang gak bisa. Gak tau gimana caranya, saya juga gak *mudeng* (paham).”

“Terkait dengan pajak ya hanya itu aja. Kalo pajak penghasilan, gak tau lah gimana caranya, saya juga tidak paham. NPWP-nya, punya saya. Kadang-kadang juga ada sensus penghasilan kesini juga sih (bukan dari pajak).” (Informan IV, lokasi di rumah dan tempat usaha Informan IV, 02 Oktober 2017)

“Ya sebenarnya itu kesalahan lebih ke saya yang tidak .... saya gak terlalu berat di pajak lah. Ya saya hanya butuh orang-orang seperti mbak, sebab karyawan saya juga sering bingung gitu loh. Lah ketika bingung, tanya-tanya begini juga jarang dapat solusi, beberapa kali harus ke Ponorogo. Lah ini ya..” (Informan VI, lokasi rumah Informan VI, 04 Oktober 2017)

Faktor yang tak kalah penting dalam mempengaruhi sikap etis informaan mengenai ketidakpatuhan adalah hasil interaksi mereka dengan petugas pajak, sebagai penyelarasan hubungan antara wajib pajak dengan peraturan supaya bisa

memenuhi kewajibannya. Berikut adalah pendapat informan mengenai pelayanan petugas pajak yang telah mereka terima selama ini,

“Selama ini gak ada masalah. Setahu saya di Pacitan kok tidak ada sesuatu yang yang miring terhadap KPPKP Pacitan. Terutama untuk untuk sosialisasinya bagus, karena saya tahu persis sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh KPPKP khususnya untuk pihak-pihak sekolah itu saya tahu.” (Informan I, lokasi di tempat usaha Informan I, 28 September 2017)

“Iya, terus kadang-kadang gini, pelayanan pajak di Pacitan itu, belum profesional.”

“Banyak hal yang ketika kita konsultasi disini gak ngatasi, akhirnya kita harus ke Ponorogo. Kan ke Ponorogo harus, Pratama ya, kalo disini hanya KPPKP aja, disini itu kalo gak bisa, ya ngomong gak bisa. Kan harusnya dia yang konsultasi ke Ponorogo itu gimana, ada permasalahan seperti ini harusnya dia.. saya ngurus PKP.. iya Pengusaha Kena Pajak itu, ke Ponorogo sampe lebih lima kali kalo gak salah itu.”

“Sebenarnya kita, juga apresiasi dengan dengan petugasnya. Maksudnya dia tidak *killer*, tapi ya itu tadi kurang agresif, kurang aktif lah. Nah ini.. tapi saya juga memaklumi lah karena mereka kan hanya sedikit, ngurusi banyak orang.” (Informan VI, lokasi rumah Informan VI, 04 Oktober 2017)

Persepsi-persepsi yang dikemukakan oleh informan dari pihak pengusaha diatas cenderung berbeda dengan penjelasan yang diberikan oleh pihak KPPKP Kabupaten Pacitan yang menginginkan wajib pajak bisa patuh karena fungsi pajak begitu penting bagi pembangunan negara, juga sistem yang dibuat telah dibuat sedemikian rupa untuk memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

“Sebenarnya kalo tanya manfaat pajak. Ini kaitannya dengan pajak bukan NPWP ya, kalo misalnya NPWP otomatis itu kan hubungannya dengan pajak. Iya kan. NPWP itu cuma istilahnya kaya emm identitasnya wajib pajak, hubungan utamanya sih dengan pajak. Kalo kaitan atau apa tadi, aa manfaat langsung ya, sebenarnya gak ada. Karena orang bayar pajak itu kan bukan kaya orang bayar parkir, bukan kaya orang bayar tagihan listrik, atau tagihan telepon. Mereka bayar listrik mereka menikmati listriknya, mereka bayar telepon mereka menikmati teleponnya. Tapi kalo mereka bayar pajak itu yang menikmati bisa aja masyarakat di Indonesia tapi di Provinsi lain, misalnya gitu. Jadi kalo tanya manfaatnya secara langsung

apa, sebenarnya manfaat langsung nggak ada. Tapi itu nanti dana-dana pajak itu nanti kan diputar lagi kemudian di-sub ke pos-pos yang membutuhkan lainnya. Jadi kalo ditanya manfaatnya langsung ya gak ada. Tapi manfaat secara keseluruhan ya untuk pembangunan di seluruh Indonesia.”

“Sebenarnya sih kalau ribet engganya sebenarnya sih ribetnya cuma di awal ya. Jadi kalo misalnya wajib pajak udah daftar, kemudian dia udah memiliki NPWP, itu kan udah melekat kewajiban pelaporan dan pembayaran. Nah itu nanti kan sebenarnya ribetnya di awal. Mereka bikin e-billing dulu kan, bikin e-billing udah selesai nanti kan bisa mereka bayarkan lewat sms bisa, lewat aa apa namanya, atm bisa. Kalau mereka punya internet bisa mereka bikin aa buka sendiri bisa. Kalau misal mau ke bank langsung di BRI, sama kalo gak salah di Bank Jatim itu sudah ada loket sendiri untuk pembayaran *billing*. Jadi mereka cukup datang, bilang mau bayar PPh yang mana, itu nanti dari sana membuat *billing*.” (Afriandita, lokasi KPPKP Pacitan, 24 Oktober 2017)

### **3. Solusi yang dapat Diberikan untuk Meningkatkan Sikap Etis yang Baik guna Menentang adanya Penghindaran dan Penggelapan Pajak**

Setiap warga negara tentunya memiliki harapan yang diinginkan kepada pemerintah supaya ada hubungan timbal balik yang berjalan dengan baik. Berikut pemaparan informan mengenai harapannya kepada pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi negara,

“Ya harapannya, ya namanya sistem itu kan semuanya baik. Kan gitu to, sistem itu semuanya baik. Tapi kan di dalam pelaksanaannya itulah yang belum tentu baik, ya harapan saya sebagai warga masyarakat ya antara sistem, perencanaan sistem dengan aplikasi penerapannya di masyarakat ya sejalan, sama-sama baiknya sehingga masyarakat ini merasa nantinya tidak apa ya, tidak di PHP oleh pemerintah. Tidak di PHP oleh pemerintah. Misalkan o pajak dari sektor apa *tax amnesty* sekian triliun sekian milyar dsb, tapi nyatanya mana kan gitu to. Nah makanya ini sebisa mungkin antara perencanaan dengan pelaksanaan sejalan. Intinya hanya itu aja.”

“Ya makanya itu, ya sepanjang, sepanjang yang pertama WP dan yang kedua adalah departemen keuangan kemudian cara- jangka pemerintah itu bisa mengelola pajak ini seduai dengan benar ya masyarakat saya pikir gak ada beratnya untuk membayar pajak karena toh pada akhirnya kembalinya juga ke masyarakat. Tetapi kalau yang terjadi kebalikannya yang jelas masyarakat akan kecewa. Makanya hal-hal penghindaran dan penggelapan itu terjadi. Tapi seandainya antara sistem kemudian pihak pelaksana pajak



baik terus departemen keuangan baik, pemerintah baik ya masyarakat pun saya pikir gak ada keberatan untuk masalah pajak.” (Informan I, lokasi di tempat usaha Informan I, 28 September 2017)

“Ya iya sekarang njenengan gak ada wiraswasta, PNS tok mbak, piye? Orang-orang kantor akhire. Soale suku beras kudu ng Solo, arep suku sampo kudu ning....”

“Iya diberikan bantuan.. Karena hidupnya pemerintah itu bisa maju karena swasta.”

“Karena kalo pajak itu harusnya itu.. ya yang saya katakan tadi itu lho. Sederhana sebetulnya. Masyarakat mau patuh pajak asal dapat reward. Selama ini, apa. Gak ada. Malah makin, makin banyak bayar pajak makin tinggi lagi. Harusnya kan dapat reward. Dapet ke Amerika, dapet kemana gitu ya kan. Ya kan seneng mbak, iya kan. Jadi saya bayar pajak ini, dapat ini, dapat reward. Harusnya seperti itu. Tapi nyatanya pajak itu habis untuk hehe.. Untuk ya itu tadi.” (Informan II, lokasi di rumah Informan II, 30 September 2017)

“Ya kalo saya sih, gak terlalu mikir sampe kesitu sih. Yang penting kerjaan ada, selesai. Udah gitu. Saya lebih berharap ada kaya mbak gitu. Maksudnya kita butuh orang yang benar-benar profesional mengerti pajak, karena kalo kita mengharap ke perpajakan, kita tahu lah, perpajakan itu kan kalo harus ngurusi pengusaha sebanyak ini.”

“Gak mungkin lah dia akan mengangkat pegawai, kalo semisal Pacitan ada seratus pegawai ya gak mungkin.” (Informan VI, lokasi rumah Informan VI, 04 Oktober 2017)

Selain harapan yang dikemukakan oleh informan pengusaha, pihak KPPKP Kabupaten Pacitan juga memiliki harapannya sendiri terhadap Wajib Pajak di Kabupaten Pacitan, seperti yang dijelaskan berikut:

“Harapannya ya sebagai, kalo ditanya dari kami ya, itu kan yang pertama kepatuhannya meningkat. Kepatuhan itu bisa dari aa apa namanya, pembayarannya, bisa darii pelaporannya, itu kepatuhan meningkat. Terus sesuai *tagline* di depan, kejujuran, lah kejujurannya juga meningkat. Jadi wajib pajak istilahnya apa ya, istilahnya transparan lah. Pemerintah sudah memberikan aa sistem perpajakan yang sedemikian fleksibel, *self assessment*, daripada nanti kami yang menentukan besarnya pajak mereka kan lebih baik mereka menentukan sendiri, iya kan. Kan ada dua, *self assessment* sama yang satunya yang dinilai oleh kantor. Kalo dinilai kantor kan kemungkinannya kan gak mungkin karena pasti akan banyak yang protes kan. Dengan sistem *self assessment* saja banyak yang protes apalagi yang dinilai oleh kantor. Itu yang kedua kejujuran ya. Kemudian yang ketiga, tadi apa toh yang pertama, kepatuhan, yang kedua kejujuran, yang



ketiga masyarakat itu kami harapkan bisa melakukan sosialisasi secara tidak langsung. Jadi gini, misalnya dari kami sudah mensosialisasi kan kami gak mungkin mensosialisasi seluruh Pacitan itu kan gak mungkin dalam satu tahun. Misalnya kami sosialisasi pengusaha di Kecamatan Punung misalnya, yang kami ambil yang besar-besar, sreeeett, kami filter yang besar, kami sosialisasi disitu, kami harapkan yang disosialisasi ini mensosialisasi ulang yang lainnya. Jadi menumbuhkan kesadaran aa untuk membayar ataupun melakukan pelaporan itu tadi. Harapannya itu sih. Yang mulai, yang harusnya dilakukan itu. Dengan itu kami harapkan nanti aa penerimaan pajak bisa meningkat.” (Afriandita, lokasi KPPKP Pacitan, 24 Oktober 2017)

Dalam permasalahan ketidakpatuhan yang masih sering dilakukan Wajib Pajak di Kabupaten Pacitan adalah adanya suatu keadaan perilaku Wajib Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang seharusnya, seperti hal berikut yang dikemukakan oleh pihak KPPKP Kabupaten Pacitan:

“Jadi sebenarnya kewajibannya ada dua, SPT surat pelaporan itu ada dua, SPT yang bulanan (Surat Pemberitahuan bulanan) sama yang tahunan. Itu kewajibannya ada dua. Kalo yang usaha itu, dia tahunan iya bulanan iya. Tapi yang bulanan itu dia diwakili dengan membayar PP 46 itu. Dengan membayar dia sudah otomatis laporan. Terus nanti di diakhir tahun, Januari sampe Maret ya itu ada SPT tahunan, itu nanti dia melaporkan apa yang sudah dia bayar dari Januari sampe Desember, kemudian ada SPT tahunan tahu kan anu namanya aa isinya, jadi pajak yang dibayar, penghasilannya dia, omzetnya itu, terus harta, lah itu dilaporkan di akhir tahun itu tadi.” (Afriandita, lokasi KPPKP Pacitan, 24 Oktober 2017)

Dari banyaknya permasalahan ketidakpatuhan mulai dari administrasi, perhitungan, hingga pelaporan, pihak KPPKP Kabupaten Pacitan juga sudah melakukan tugasnya dengan semaksimal mungkin meskipun dengan keterbatasan kewenangan dan sumber daya manusia yang ada, seperti dalam melakukan sosialisasi maupun konsultasi. Berikut pernyataan yang dikemukakan informan dari pihak KPPKP Kabupaten Pacitan:

“Sebenarnya solusinya sih setiap wajib pajak yang baru itu sebenarnya sudah disosialisasi pada waktu pengambilan NPWP. Jadi kewajibannya itu

ini ini ini gitu kan, terus WP nya iya iya iya gitu. Tapi ya ya ya nya juga kadang apa namanya, tidak dilaksanakan. Itu tadi.”

“Sebenarnya sih hampir semuanya gak ngerti ya. Ya bagaimananya sih tergantung-masing-masing dari aa individunya juga ya. Kan ada yang masing-masing orang beda-beda. Kan ada yang sabar, ada yang gak sabaran, ada yang ogah-ogahan, ada yang menjelaskan sampe detail gitu ya. Ya awalnya mungkin kita kasih pengertian dulu bahwa aa pajak itu seperti ini ini ini, terus kemudian nanti tergantung dianya, dianya itu sebagai pengusaha, sebagai karyawan, kemudian sebagai aa pemilik pekerjaan bebas kayak dokter, arsitek, itu kan pekerjaan bebas. Terus nanti dari kategori- kategori ini baru kita jelaskan satu persatu secara detail mulai dasarnya. Misalnya kalo usaha nanti omzetnya aa dalam satu bulan nanti dipotong satu persen, satu persennya itu dari omzet kotoranya, kemudian nanti pembayarannya lewat *billing* bisa lewat bank bisa. Jadi kita mulai dari dasar dulu terus lagi kalau misalnya dia sudah mulai kelihatan pusing ya kita stop. Jadi kita kasih inti-intinya dulu apa yang harus dikerjakan. Jangan sampe aa kita ngomong panjang lebar dia gak tau intinya dia harus ngapain kan. Jadi intinya kita jelaskan dulu yang paling gampangnya kewajibannya dia itu seperti apa, gitu aja. Nanti kan berjalannya waktu kan dia sudah mulai ngerti kan kewajibannya ini ini ini, terus nanti untuk melakukan kewajiban yang sedemikian itu, yang kita jelaskan tadi, prosesnya seperti apa. Pasti dia nanti akan lama-lama juga ingin tahu sendiri, bisa sendiri setelah kita jelaskan dasarnya dulu.” (Afriandita, lokasi KPPKP Pacitan, 24 Oktober 2017)

Salah satu informan pengusaha juga memberikan saran solusi dari permasalahan ketidakpatuhan supaya para wajib pajak di Kabupaten Pacitan bisa lebih taat pajak, terutama bagi WPOP pengusaha yang notabenenya kurang cakap dalam mengurus administrasi perpajakan. Berikut saran yang beliau berikan ketika ditanya masalah pelaporan pajak,

“Jarang mbak, makanya kalo mbaknya bisa, sebenarnya ini peluang lho mbak. Ketika lulus nanti mbaknya gak usah nyari pekerjaan. Ini aja biro. Perusahaan-perusahaan itu datang. Terus narik, tarifnya jangan tinggi-tinggi. Maksudnya biar mereka itu mikir daripada aku meluangkan waktu setengah hari mendingan aku bayar katakanlah lima puluh ribu seratus ribu, lah mbaknya kan sudah kerjanya, kan cepet, ngerjain itu, paling gak sampe satu jam kan sudah selesai.”

“Loh ya bener ini. Peluang ini.. jadi bahkan kalo seperti ini mbaknya gak perlu ada legalitas yang anu, yang penitng kan kepercayaan. Seperti saya kepercayaan terhadap mbak, kan mbaknya bisa aja seolah-olah sebagai karyawan saya. Seolah-olah. Iya kan.. jadi gak, yang penting bagaimana

mbaknya bisa menanamkan kepercayaan kepada klien-klien mbak. Lah ini tidak usah muluk-muluk. Mbak gak usah muluk-muluk harus berapa yang dibantu. Mbak bisa pegang satu dua dulu nanti merembet. Mereka yang dipegang kan tiap bulan ada laporan. Mbak buat kan, mbak bantu. Pengusaha-pengusaha kan lebih senang seperti itu, ada kesulitan bisa bantu, bisa ngasih solusi. Itu peluang. Bagus itu sebenarnya. Gak usah sibuk-sibuk cari pekerjaan, apalagi mbaknya cewek.”

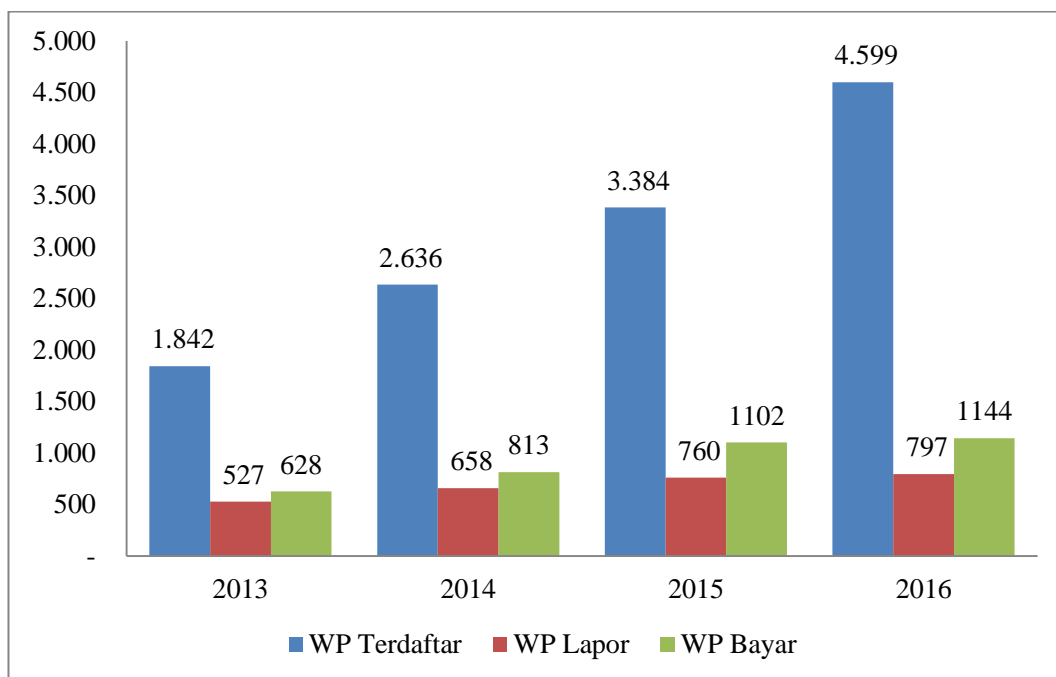
“Tidak harus punya lisensi dululah. Mbak jual jasa aja, gak harus nunggu lulus kok. Seperti saya gak butuh lisensi kamu.. yang penting pajak saya beres, selesai to.” (Informan VI, lokasi rumah Informan VI, 04 Oktober 2017)

### C. Analisis Data

Ketidakpatuhan yang berlangsung di kalangan wajib pajak Indonesia merupakan hal yang sulit untuk dikendalikan oleh pemerintah. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi praktik ketidakpatuhan ini, namun wajib pajak juga semakin cerdas dalam usahanya menghindari kewajiban perpajakan. Ada banyak alasan yang mendasari mengapa hal ini masih dilakukan sehingga mengakibatkan target pajak tidak bisa terealisasi. Meski masih menjadi kontroversi, perilaku wajib pajak yang tidak patuh juga tidak bisa disalahkan begitu saja. Hukum tertulis tidak serta merta bisa menjadikan masyarakat tunduk dan patuh. Hal tersebut dikarenakan hukum yang dibuat oleh manusia pada hakekatnya masih banyak kekurangannya dan tidak memungkinkan bisa mencakup semua permasalahan yang dihadapi setiap individu yang menjadi subjek hukumnya. Adapun berikut akan dibahas mengenai sikap etis pengusaha UMKM di Kabupaten Pacitan mengenai penghindaran dan penggelapan pajak, faktor pendukungnya serta solusi yang bisa diberikan untuk mengurangi praktik ketidakpatuhan tersebut.

### **1. Analisis Sikap Etis Pengusaha UMKM di Kabupaten Pacitan mengenai Penghindaran dan Penggelapan Pajak**

Perilaku penghindaran dan penggelapan pajak merupakan suatu bentuk ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak, terutama dalam bahasan ini adalah pengusaha UMKM. Sikap etis yang terlihat dari pelaksanaan administrasi, pembayaran dan pelaporan menunjukkan bahwa wajib pajak untuk golongan pengusaha UMKM cenderung memiliki sikap yang kurang patuh terhadap perpajakan. Pajak yang dikenakan untuk Wajib Pajak dengan omzet dibawah 4,8 Milyar umumnya dikenakan tarif satu persen dari omzet (peredaran usaha bruto). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas usaha dengan Penghasilan Bruto dan Kriteria Tertentu. Setiap Wajib Pajak yang masuk dalam kriteria ini diharuskan untuk melakukan pembayaran Pajak Penghasilannya setiap bulan berjalan yangmana kewajiban tersebut sudah termasuk dalam pelaporannya. Meski demikian Wajib Pajak juga diwajibkan melakukan pelaporan SPT untuk tahun berjalan di akhir periode. Namun kenyataannya, seperti yang diungkapkan oleh informan I dan informan II pada halaman 54 serta konfirmasi oleh Afriandita selaku pihak KPPKP Kabupaten Pacitan, para wajib pajak ini masih banyak yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tiap bulan seperti yang diharapkan pemerintah. Berikut data mengenai kepatuhan WP UMKM Kabupaten Pacitan dari KPP Ponorogo yang digambarkan dalam grafik pada gambar 3.



Gambar 3. Kepatuhan Pelaporan SPT dan Pembayaran Pajak WP UMKM Kabupaten Pacitan 2013 – 2016

Sumber: Kantor Pajak Pratama Ponorogo, 2017

Bisa dilihat dari gambar diatas, grafik menunjukkan angka yang tinggi pada jumlah WP terdaftar dan cenderung meningkat tiap tahunnya. Namun demikian, kepatuhan WP yang melaporkan SPT berada pada angka yang rendah, yaitu tahun 2013 sebesar 28,61%; tahun 2014 sebesar 24,96%; kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi sebesar 22,46%; dan tahun 2016 juga menurun lagi menjadi sebesar 17,33%. Perhitungan tersebut didapat dari persentasi perbandingan antara WP lapor dengan WP terdaftar pada tahun yang sama. Sedangkan WP yang membayar jumlahnya cenderung lebih besar dari WP yang melakukan pelaporan SPT meskipun tingkat kepatuhannya masih tergolong rendah, yaitu tahun 2013 sebesar 34,09%; tahun 2014 sebesar 30,84%; tahun 2015 sebesar 32,57%; kemudian mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi sebesar 24,87%. Perhitungan tersebut didapat dari persentasi perbandingan antara



WP bayar dengan WP terdaftar pada tahun yang sama. Hasil perhitungan dari tahun 2013 – 2016 baik pada WP lapor maupun WP bayar, masih berada pada tingkat yang rendah. Hal tersebut dikarenakan WP yang terdaftar biasanya hanya melakukan kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP sebagai syarat administrasi pekerjaan yang dilakukan. Selebihnya mereka tidak melakukan kewajiban perpajakan lainnya karena tidak merasa mampu untuk membayar pajak.

Jumlah WP bayar pada Gambar 3 juga selalu menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan WP lapor. Ketidaktahuan seringa menjadi alasan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Mereka merasa bahwa hanya dengan membayar pajak, maka kewajiban mereka telah selesai. Padahal aturan perpajakan juga mengharuskan wajib pajak untuk melaporkan kekayaannya pada akhir tahun pajak. Selain ketidaktahuan dalam melapor, beberapa wajib pajak juga tidak mengerti cara perhitungan dan pengadministrasian pajak mereka. Mereka pun akhirnya lebih banyak meminta bantuan dari pihak petugas pajak untuk menghitung besarnya pajak yang harus mereka bayarkan, seperti yang dilakukan oleh informan I, III, IV, V, dan VI pada halaman 55-56. Sedangkan sudah jelas bahwa sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment system*.

Dilihat dari sisi kejujurannya, wajib pajak juga memiliki kecenderungan tidak menyampaikan penghasilan yang apa adanya. Ketidakmauan membayar pajak yang besar diungkapkan oleh informan II, IV, V pada halaman 57-58. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh McGee (2012) pada salah satu pandangannya yaitu *tax evasion is sometimes ethical*. Pandangan ini menjelaskan

bahwa wajib pajak bisa saja tidak patuh jika mereka tidak puas dengan kinerja pemerintah yang ada karena adanya penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah, serta disisi lain Wajib Pajak juga merasa pajak yang wajib mereka bayarkan lebih besar dari kemampuan.

Informan II menambahkan dengan memberikan penjelasan mengenai ketidakadilan yang didapat dari pelaksanaan PP 46 tahun 2013. Sesuai dengan salah satu teori prinsip pemungutan pajak dari Adam Smith (1776) yang sebelumnya telah dibahas pada halaman 29, yaitu prinsip keadilan, pengenaan PP 46 tahun 2013 tersebut tidak mencerminkan keadaan yang demikian. Namun disini perlu ditekankan lagi bahwa tujuan dari pelaksanaan peraturan ini adalah perwujudan dari teori *presumptive tax* yaitu memberikan kemudahan serta menciptakan kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Konsep dari *presumptive tax* lebih mengarah pada tata cara pemajakan dimana pajak yang dikenakan berdasarkan pada perkiraan atau pendugaan. Tata cara pemajakan ini dilakukan karena pemerintah memandang sulitnya menentukan dasar pemajakan yang akurat secara akuntansi. Dalam praktiknya, konsep pemajakan ini sayangnya harus bertentangan dengan prinsip utama pemajakan, terutama pada prinsip keadilan yang vertikal. Perlu untuk mengesampingkan prinsip ini untuk bisa mencapai tujuan utama dari penerapan konsep *presumptive tax* pada PP 46 tahun 2013

Permasalahan pada *hard-to-tax sector* bisa diatasi dengan menggunakan konsep pemajakan *presumptive tax*. Sehingga diharapkan dapat mewujudkan keadilan horizontal yang lebih besar dimana sektor *hard-to-tax* yang selama ini

tidak tersentuh pajak, minimal bisa ikut terjaring keikutsertaannya dalam membayar pajak. Pelaksanaannya dibuat sedemikian sederhana untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Meskipun pengenaan pajak yang lebih sederhana telah diterapkan pada UMKM, namun masih ada sikap tidak patuh yang dilakukan oleh wajib pajak UMKM. Mereka cenderung tidak membayar pajak dengan rajin setiap bulannya. Alasan yang mereka kemukakan adalah bahwa kegiatan usaha yang mereka lakukan tidak bisa menghasilkan penghasilan tetap setiap bulan. Oleh karenanya, jumlah pajak ditetapkan dengan asumsi yang mereka anggap wajar, kemudian dibayarkan dalam sekali waktu yang mencakup satu periode pencatatan. Biasanya pembayaran dilakukan setahun sekali seperti yang dilakukan oleh informan I pada halaman 56.

Informan II pada halaman 57 menyatakan bahwa dirinya mengaku memang sedang menghindari pajak dengan melakukan usaha yang omzetnya dalam pencatatan dinyatakan seminimal mungkin. Informan III pada halaman 57 mengaku ketidaktahuannya pada prosedur pajak mengharuskannya menyerahkan seluruh administrasi pajak ke pihak lain, tanpa mempedulikan dirinya bisa menjadi pihak yang dirugikan atau tidak. Lain halnya dengan informan IV pada halaman 57 yang merasa telah membayar pajak melalui pinjaman hutang yang ia lakukan di bank, padahal menurut konfirmasi dari pihak KPPKP hal tersebut hanya berlaku pada pembuatan NPWP. Petugas bank tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemotongan dan hanya bertugas membantu nasabahnya untuk mendapatkan pinjaman hutang bank dengan melengkapi salah

satu syarat yaitu kepemilikan NPWP. Informan IV tidak merasa memiliki tanggungan kewajiban membayar pajak serta terksesan tak acuh pada sistem perpajakan yang ada, bahkan menurutnya pajak penghasilan itu kalau bisa ditekan seminim mungkin. Hal tersebut akhirnya berdampak pada perbedaan jumlah WP terdaftar dengan WP lapor dan WP bayar yang cukup tinggi seperti yang terjadi pada Gambar 3. Pengusaha kecil yang terpaksa membuat NPWP, tidak mau melakukan pembayaran ataupun pelaporan pajak karena menganggap dirinya tidak masuk kategori yang harus membayar pajak serta keterbatasan informasi yang tidak mereka ketahui mengenai pelaporan pajak. Berbeda dengan informan V dan VI pada halaman 58 yang menunggu pihak lain untuk memberikan motivasi menyelesaikan kewajiban. Bahkan informan VI yang telah merupakan PKP, hanya melakukan pembayaran ketika suatu proyek yang akan dilakukan mengharuskannya melampirkan laporan perpajakan.

Perilaku yang digambarkan pada keadaan diatas tentu saja tidak sesuai dengan fungsi pajak sebagai fungsi anggaran yang diharapkan pemerintah. Pemerintah memiliki tujuan sendiri memberlakukan fungsi pajak tersebut sebagai alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara. Jika yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan maksud seperti pada halaman 18, tentu saja optimalisasi yang diharapkan tidak bisa terwujudkan. Hal tersebut terbukti pada hasil pencapaian realisasi perpajakan dari target pajak oleh KPP Pratama Ponorogo yang ditunjukkan pada tabel 5. Realisasi penerimaan pajak tidak bisa tercapai dan mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga 2016 karena

pemerintah terus menaikkan targetnya, namun wajib pajak disisi lain semakin tidak patuh terhadap peraturan perpajakan.

**Tabel 5. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Ponorogo**

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
2013	300.783.056.119	245.323.342.083	81,56%
2014	292.544.552.870	288.371.843.437	98,57%
2015	431.767.173.139	339.957.280.191	78,74%
2016	501.000.000.000	379.160.917.036	75,68%

Sumber: Kantor Pajak Pratama Ponorogo, 2017

Bagi para pengusaha kecil, mempelajari pajak bukanlah suatu hal yang mudah. Mereka yang rata-rata terlanjur menghabiskan waktunya untuk mengembangkan bisnis sesuai dengan minat dan bakat mereka tidak mau lagi susah payah untuk mempelajari hal lain yang tidak memberi keuntungan langsung bagi kemajuan usahanya. Dari jawaban yang diberikan oleh para informan pengusaha pada halaman 59-61 mengenai penghindaran dan penggelapan pajak, diketahui bahwa mereka cenderung tidak memahami hakekat penghindaran dan penggelapan pajak yang menjadi isu penting bagi pemerintah untuk segera diselesaikan. Perbedaan kepentingan diantara dua pihak terlihat sangat kentara disini. Pihak pengusaha juga merasa tidak bisa disalahkan atas ketidakpatuhan yang dilakukannya. Menurut mereka, selama petugas pajak tidak melakukan tindakan penagihan aktif, mereka merasa tidak memiliki tanggung jawab untuk memehuhi kewajiban pajaknya.

Dari pihak wajib pajak sendiri, ada dua kubu yang memandang berbeda mengenai etika pajak. Pihak yang tidak mendukung penghindaran dan penggelapan pajak merasa ada unsur ketidakadilan jika mendengar ada pihak lain yang melakukannya dalam jumlah besar, meski demikian sikapnya sendiri belum



bisa menunjukkan kepatuhan yang seratus persen. Sedangkan pengusaha lain yang mendukung positif penghindaran dan penggelapan pajak melakukannya dengan alasan untuk memanfaatkan peluang, selain itu juga adanya kewaspadaan bahwa menurutnya pajak bisa mengganggu kelangsungan usahanya, seperti yang disampaikan informan II pada halaman 60. Hal lain diungkapkan oleh informan VI pada halaman 60 dimana sudah menjadi sesuatu yang umum bila laporan keuangan yang dilaporkan oleh pengusaha bukanlah keadaan yang sebenarnya. Pembuatan dua pencatatan keuangan yang berbeda sudah merupakan bentuk ketidakjujuran yang dilakukan oleh wajib pajak.

Melakukan pencatatan atas transaksi yang dilakukan perlu dilakukan untuk menghitung laba usaha. Perhitungan pendapatan bruto juga harus meliputi keseluruhan hasil penerimaan yang telah didapat. Namun yang terjadi, para pengusaha ini hanya melaporkan sebesar yang ingin dibayarkan saja. Sehingga yang dijadikan dasar dalam membayar pajak adalah pada besarnya kerelaannya menyumbangkan hasil pendapatan kepada pemerintah dan bukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bagi mereka, yang terpenting adalah telah melakukan pembayaran pajak meskipun tidak sebesar yang seharusnya dibayarkan dan dilaporkan sesuai UU perpajakan.

Dari sikap etis perpajakan yang terjadi di kalangan pengusaha kecil Kabupaten Pacitan, diperoleh dua pandangan yang berbeda seperti yang dijelaskan oleh McGee (2012). McGee sendiri juga mempunyai empat pandangan mengenai penggelapan pajak, yaitu: (1) *tax evasion is never ethical*; (2) *tax evasion is always ethical*; (3) *tax evasion is sometimes ethical*; dan (4) *there is an*

*affirmative duty to evade taxes*. Melihat keadaan yang terjadi di lapangan, hal tersebut sesuai dengan pandangan ketiga. Pada pandangan ini terdapat kemungkinan adanya faktor-faktor penyebab mengapa penggelapan pajak bisa etis untuk dilakukan dan untuk perihal ini akan dibahas pada sub bab tersendiri.

## **2. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap Etis Pengusaha Kecil di Kabupaten Pacitan mengenai Penghindaran dan Penggelapan Pajak**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai sikap wajib pajak dalam melakukan administrasi perpajakan, maka akan terlihat berbagai perbedaan dimana masing-masing wajib pajak memiliki persepsi dan tindakan yang berbeda-beda. Disini terbukti bahwa Undang-undang atau peraturan saja tidak cukup untuk bisa menjadikan seseorang bisa mematuhi tanpa terkecuali. Ada bermacam-macam faktor yang bisa membentuk persepsi dan tindakan yang mereka ambil dalam keputusan perpajakan mereka. Berikut hasil analisa faktor-faktor yang mempengaruhi sikap etis pengusaha kecil di kabupaten Pacitan mengenai penghindaran dan penggelapan pajak berdasarkan unsur-unsur tertentu:

### **a. Sistem Pajak**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada BAB II Tinjauan Pustaka, sistem pajak merupakan satu kesatuan unit dari hukum, kebijakan, administrasi, dan prinsip pemungutan pajak. Keempatnya harus berjalan saling bersinkronisasi untuk bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Ibarat mesin, empat unsur tersebut merupakan komponen yang harus ada untuk menggerakkan mesin. Bila salah satunya tidak dirumuskan dan dieksekusi dengan baik, maka yang terjadi adalah

ketimpangan fungsi pada bagian tertentu sehingga menyebabkan mesin tersebut tidak berjalan secara optimal. Namun demikian, perumusan dan pelaksanaan ilmu sosial tidak serta merta bisa memuaskan semua pihak yang terlibat. Paling tidak sistem yang diberlakukan harus dirumuskan dan dilaksanakan tanpa menimbulkan kerugian pihak tertentu.

Hukum pajak merupakan Undang-Undang yang menjadi dasar para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Aturan yang tertulis dalam Undang-Undang perpajakan mencakup hak dan kewajiban wajib pajak juga fiskus selaku pihak yang diberi amanah oleh pemerintah sehingga mereka tidak bisa berlaku sewenang-wenang dalam melakukan pemungutan pajak. Salah seorang informan mengeluhkan mengenai hukum pajak yang kurang berkeadilan terutama dalam pelaksanaannya. Sifat hukum pajak memang cenderung lebih kaku dan sulit untuk diubah. Sanksinya pun tidak main-main. Namun informan II justru merasa tidak memiliki keinginan untuk patuh karena prosedur dan peraturan dalam Undang-Undang menjadikan dirinya pada posisi yang tidak menguntungkan. Pelaksanaan Undang-Undang di lapangan biasanya tidak melihat kondisi atau keadaan wajib pajak dan bisa memaksa mereka melakukan kewajiban yang tidak bisa mereka penuhi karena keadaan yang telah berubah.

Kebijakan pajak merupakan suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam bidang perpajakan dengan melibatkan bidang lain. Seperti misalnya yang dialami oleh informan IV dan V yang memiliki NPWP karena merupakan suatu syarat bagi mereka untuk mendapatkan modal usaha dan dalam rangka memajukan bisnis. Kebijakan pemerintah ini bernilai positif, namun jika tidak

didukung oleh unsur yang lain, tidak akan bisa mencapai hasil yang baik. Salah satu kebijakan pajak yaitu adanya program *tax amnesty*. Namun sayangnya dari ke-enam informan yang ditemui oleh peneliti tidak ada yang mengikuti program tersebut. Melalui konfirmasi dari pihak KPPKP Kabupaten Pacitan pun, menilai bahwa program ini memang tidak ditujukan bagi pengusaha kecil karena mereka dirasa tidak bisa dijadikan target penggalan potensi.

Administrasi pajak yang efektif berperan penting dalam sistem perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Dari pengalaman yang dialami oleh informan III, V, dan VI pada halaman 64-65, mereka cenderung kurang memahami administrasi perpajakan dengan baik. Kepatuhan mereka akhirnya bergantung pada sikap aktif petugas pajak. Banyaknya aturan khusus juga membuat informan V justru enggan membayar pajak.

Unsur terakhir yang ada dalam sistem pajak adalah prinsip pemungutan pajak dimana prinsip ini mencakup keseluruhan proses yang berlangsung dalam sistem pajak. Dari pengalaman informan II pada halaman 65-66, ditemukan bahwa adanya pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan prinsip yang dikemukakan oleh Adam Smith (1776) (dalam Rahmat, 2011) yaitu *certainty* atau kepastian. Pada kasus yang dialami oleh Informan II tersebut, adanya tindakan ketidakpastian pada kebijaksanaan petugas pajak yang mengakibatkan informan II berprasangka negatif terhadap pajak.

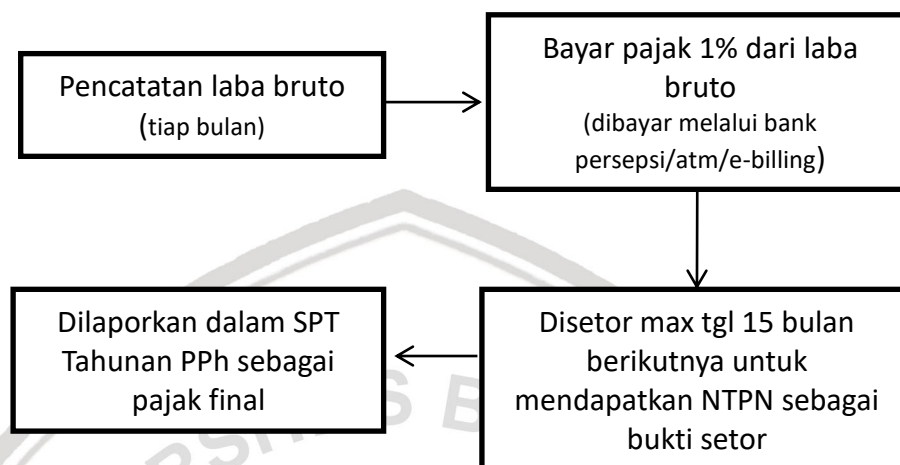
Sistem pajak merupakan alat yang dibuat oleh pemerintah untuk menggali potensi pajak yang ada. Penting untuk memastikan bahwa sistem yang dibuat tidak merugikan atau menguntungkan pihak-pihak tertentu. Administrasi, hukum,

kebijakan, dan prinsip pemungutan pajak harus bisa dilaksanakan sejalan dari pusat hingga sub terkecilnya. Bukan perkara mudah untuk bisa mengintegrasikan sistem perpajakan yang baik tanpa cacat, karena masing-masing unsurnya memerlukan perhatian dan kajian yang mendetail. Jika bagian pendukung dari unsur yang ada ditemukan bermasalah, tentu hal itu akan dapat mengganggu keutuhan sistem. Penerapan sistem manajemen pajak paling penting terletak pada pengawasan yang tertib dan berkelanjutan. Pengawasan merupakan salah satu amanat yang harus dijaga oleh pemerintah karena aktivitas pemungutan pajak bersinggungan langsung dengan hak dan kewajiban wajib pajak. Tanpa adanya pengawasan yang jelas, penyelewengan kekuasaan bisa saja terjadi dan pada akhirnya opini negatif dari masyarakat akan terbentuk dan pemerintah akan kesulitan menumbuhkan kembali kepercayaan yang sebelumnya telah dibangun dengan baik dalam sistem.

Bagi pemerintah sendiri, tidak mudah untuk mengikuti permintaan wajib pajak yang menghendaki sistem pajak yang mudah dan sederhana. Jenis pajak yang dikenakan di Indonesia memiliki tarif dan karakteristik yang beragam sehingga aturan yang dibuat pun juga tidak bisa disamakan antara satu jenis pajak dengan yang lainnya. Kesederhanaan sistem pajak hanya mungkin dicapai jika pemerintah mau melepas salah satu atau beberapa potensi pajak dan menyamarakatan suatu jenis pajak dengan tarif tunggal. Di Indonesia sendiri, salah satu jenis pajak yang dibuat sederhana adalah pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu maksimal 4,8 milyar. Berikut alur sederhana pada



Gambar 4 yang bisa digunakan untuk memberikan arahan wajib pajak UMKM dalam mengadministrasikan pajak penghasilannya.



Gambar 4. Alur Pengadministrasian PP 46 Tahun 2013

#### b. Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak kepada Pemerintah

Pemerintah selaku eksekutif dalam pelaksanaan pemerintahan akan selalu menjadi sorotan publik. Sebagai negara demokrasi, wajar jika masyarakat memiliki hak bersuara untuk menilai kualitas dari pelaksanaan pemerintahan saat ini. Kebijakan pusat seringkali memiliki pengaruh terhadap kegiatan perekonomian hingga ke tingkat daerah, seperti kenaikan harga bahan baku yang berpengaruh terhadap tingkat daya beli masyarakat. Wujud nyata pelaksanaan pemerintahan yang lain bisa dilihat dari kinerja pegawai negeri sipil yang bekerja di berbagai lini kantor pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

Tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah bisa mempengaruhi sikap wajib pajak pengusaha UMKM. Informan I dan III pada halaman 66-67 yang memberi apresiasi positif terhadap kinerja pemerintah mewujudkannya dengan membayar pajak dengan patuh meskipun belum sesuai dengan prosedur

yang seharusnya. Patuh disini, mereka membayar pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Informan VI dan V pada halaman 67-68 tidak memberikan apresiasi yang sama mengenai kinerja pemerintah. Mereka cenderung apatis terhadap apa-apa yang pemerintah lakukan selama usaha yang mereka kerjakan tetap berjalan lancar. Hal tersebut juga berimbas pada kewajiban mereka yang akan mereka penuhi hanya ketika ada pihak lain yang mensyaratkan untuk memenuhi kewajiban pajak yang bersangkutan.

Berbeda hal dengan informan II pada halaman 68 yang merasa dirugikan dengan cara kerja yang dipakai oleh pemerintah. Secara gamblang menyatakan bahwa dirinya tidak mau berurusan dengan aktifitas pemerintahan karena merasa uang hasil jerih payahnya hanya dihabiskan oleh pemerintah tanpa adanya kejelasan wujud nyata. Inilah yang sesuai dengan teori yang diungkapkan McGee (2012) pada jurnalnya yang berjudul "*Duty to Whom*". Ada tiga pemikiran yang dikemukakan oleh McGee mengenai hal ini, yang pertama adalah kewajiban membayar pajak atas perintah agama (*duty to God*), yang kedua kewajiban membayar pajak untuk sesama (*duty to others*), dan ketiga kewajiban membayar pajak kepada pemerintah (*duty to the State*).

Ketiga pemikiran diatas bukan tanpa kelemahan. Informan II secara jelas membantah untuk mau melakukan kewajiban pajak kepada pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah belum bisa melakukan efisiensi penggunaan dana masyarakat untuk hal yang lebih penting. Salah satu argumen yang ada pada teori tersebut juga menyebutkan bahwa sektor swasta dikatakan lebih baik dalam

melakukan efisiensi sumber daya dibandingkan dengan yang dilakukan pemerintah. Itulah mengapa terdapat pendapat yang menyatakan penghindaran pajak perlu dilakukan untuk mengurangi jumlah uang yang terbuang sia-sia.

### c. Keadaan Ekonomi

Berdasarkan informan II, V, dan VI pada halaman 67-69 kebijakan-kebijakan pemerintah serta keadaan pasar banyak mempengaruhi perkembangan usaha UMKM di daerah. Mulai dari kebijakan impor yang berpengaruh pada harga pasar barang lokal hingga kenaikan tarif dasar listrik dan bahan pokok yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Dengan keadaan ekonomi mikro yang melemah, mengakibatkan pengusaha juga banyak melakukan penghematan, termasuk dalam urusan pajak. Dalam keadaan seperti ini pemerintah juga tidak bisa terus menggali potensi karena memang uang yang mereka cari tidak bisa didapat dari wajib pajak pengusaha UMKM.

Keadaan seperti ini bisa dihubungkan dengan teori "*the Just State*" yang artinya pemerintah yang adil. Dikarenakan negara Indonesia menganut sistem ekonomi campuran, jadi Negara juga mempunyai andil dalam membuat keputusan yang mempengaruhi ekonomi masyarakat. Semakin adil suatu negara, maka kewajiban membayar pajak semakin tinggi, dan semakin tidak adanya keadilan dalam sistem di suatu negara maka semakin kecil juga kewajiban membayar pajak. Adil disini sama seperti yang disampaikan oleh Adam Smith berdasarkan prinsip ekonomi bahwa pajak hendaknya tidak menghalangi Wajib Pajak untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan ekonominya serta pajak harus bisa

memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat daripada beban yang ditanggung oleh masyarakat.

#### **d. Kesadaran Wajib Pajak**

Dari pengakuan informan II, IV, dan VI pada dalam halaman 69, membayar pajak bagi mereka adalah bentuk dari keterpaksaan bukan karena kesadaran. Keterpaksaan tersebut didasari dari persepsi bahwa membayar pajak tidak memberikan keuntungan langsung kepada mereka. Itulah mengapa Wajib Pajak akan berusaha membuat kewajiban pajaknya kecil karena mereka tidak rela uangnya digunakan untuk kegiatan yang mereka tidak ikut menikmatinya. Permasalahan bahwa pajak tidak bisa memberikan kontribusi langsung juga diungkapkan oleh Afriandita dari pihak KPPKP pada halaman 72. Menurutnya, pajak memang tidak bisa memberikan manfaat langsung tetapi berguna untuk pembangunan di seluruh Indonesia.

Dari kasus diatas, memunculkan pertanyaan seperti pada teori “*duty to whom*” oleh McGee melalui pernyataan mengapa kita perlu ikut membiayai proyek yang tidak kita ingini, apakah ada moral bagi kita untuk ikut dalam pendanaan tersebut? Namun kembali lagi pada fungsi pemerintah sebagai penyelenggara negara, dan sebagai warga negara salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk membantu dalam penyelenggaraan tersebut adalah membayar pajak.

Hanya informan I yang pada halaman 69 menyatakan cukup sadar mengenai pajak karena menurutnya tidak ada negara yang bisa berdiri tanpa didukung oleh pajak. Namun, pernyataan ini juga perlu dipahami lebih lanjut

seperti yang dikemukakan oleh McGee (2012) dalam jurnalnya yang berjudul “*An Analysis of Some Arguments*” pada bab *The “Government Couldn’t Exist Without Taxes” Argument*. Disini dikatakan bahwa pernyataan ini tidak sepenuhnya benar karena pemerintah serta merta masih bisa mendanai penyelenggaraan negara dari pengguna jasa, undian, dan kontribusi sukarela. Oleh karenanya mungkin yang benar untuk dikatakan adalah pada saat tertentu pemerintah memerlukan pajak untuk melaksanakan fungsi pemerintahan karena pendapatan dari dana bukan pajak tidak bisa memenuhi target belanja negara.

#### **e. Sanksi Hukum**

Pelaksanaan perpajakan erat kaitannya dengan hukum perdata maupun hukum pidana. Hukum pajak menjadikan peristiwa-peristiwa (kematian, kelahiran), keadaan (kekayaan), kejadian (jual beli, sewa-menyewa) dalam hukum perdata sebagai sasaran pajak. Sedangkan hukum pidana dalam pajak berkaitan dengan hubungan kewajiban seseorang sebagai warga negara kepada negaranya. Namun nyatanya hal ini oleh informan II dijadikan sebagai alasan untuk takut terhadap pajak, baik dalam rangka kepatuhan maupun ketidakpatuhan. Baginya jika patuh, maka akan dijadikan sasaran untuk dikejar pajaknya karena dianggap memiliki potensi, namun sebaliknya jika tidak patuh ancaman hukumnya juga semakin besar.

Dalam salah satu bab yang berjudul *The Law Is tsahe Law* dalam jurnal “*An Analysis of Some Arguments*” oleh McGee (2012) dinyatakan juga bahwa perlu untuk tidak mematuhi aturan yang dirasa tidak memberikan keadilan. Peraturan yang tidak memberikan keadilan bagi warga negara hanya akan



membatasi kemerdekaan orang tersebut. Namun kembali lagi makna keadilan bagi setiap orang pun juga berbeda-beda. Perlu untuk dipertimbangkan bahwa selama kita tidak mengambil hak milik orang lain, maka hukum saja tidak bisa digunakan untuk memberikan sanksi pada siapa-siapa yang dianggapnya bersalah.

#### **f. Ketidaktahuan**

Salah satu hal yang menjadi alasan wajib pajak tidak bisa melaksanakan kewajibannya adalah ketidaktahuan mereka terhadap sistem pajak yang ada seperti yang disampaikan oleh Informan IV dan VI pada halaman 70-71. Ketidaktahuan itu kemudian menjadi sikap tak acuh terhadap kewajibannya. Konfirmasi Afriandita dari pihak KPPKP Kabupaten Pacitan menyatakan bahwa sebenarnya pada setiap pembuatan NPWP, setiap wajib pajak telah diberi pembekalan mengenai hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Namun karena kemampuan daya tangkap setiap orang berbeda-beda menyebabkan sebagian informasi yang disampaikan dari petugas pajak tidak bisa diserap dengan sempurna oleh penerimanya. Padahal sangat penting untuk bisa memahami dasar-dasar pengetahuan pajak guna mempermudah administrasi pajak di kemudian hari jika hal tersebut bisa banyak membantu kelangsungan usaha.

#### **g. Pelayanan Pegawai Pajak**

Berdasarkan pengalaman informan I dan VI pada halaman 71, pelayanan pegawai pajak yang mereka terima dari KPPKP Kabupaten Pacitan sudah cukup baik meski belum bisa sepenuhnya membantu informan VI dalam menyelesaikan masalahnya. Keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh KPPKP menjadi alasan semua persoalan perpajakan tidak bisa diselesaikan di kantor tersebut, terutama

jika berkaitan dengan Pengusaha Kena Pajak maka wajib pajak dengan sukarela harus bersedia mendatangi KPP Ponorogo sendiri. Masalah ini mengakibatkan wajib pajak enggan patuh pajak karena menurutnya sistem yang ada terlalu rumit sementara dirinya mempunyai tanggungan usaha yang harus diselesaikan sendiri.

### **3. Solusi yang dapat Diberikan untuk Meningkatkan Sikap Etis yang Baik guna Menentang adanya Penghindaran dan Penggelapan Pajak**

Sebelum bisa memberikan solusi guna menentang penghindaran dan penggelapan pajak, perlu diketahui dahulu mengenai harapan yang diinginkan dari pihak pengusaha kecil dan pemerintah. Pada halaman 73, informan I, II, dan VI dari pihak pengusaha memiliki harapan yang berbeda-beda. Informan I mengharapkan keterbukaan pemerintah dalam manajemen keuangan, kejelasan dalam penggunaan uang pajak, serta pelaksanaan administrasi yang sesuai dengan perencanaan. Informan II mengharapkan dari pemerintah untuk bisa memberikan semacam manfaat yang langsung kepada wajib pajaknya, sehingga mereka termotivasi untuk tidak melakukan penghindaran ataupun penggelapan pajak, tidak selalu pekerjaan pemerintah sekadar menghabiskan uang rakyat tanpa mereka diberikan manfaat yang berarti. Informan VI justru memiliki harapan lain, bukan pada kinerja pemerintah tetapi mengharapkan adanya tenaga terampil di bidang perpajakan yang dapat membantu menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Harapan lain adalah dari Afriandita selaku pihak KPPKP Pacitan pada halaman 74. Pertama, kepatuhan wajib pajak berupa pembayaran dan pelaporan.

Kedua, kejujuran meningkat sehingga jelas transparansinya dari wajib pajak. Afriandita juga menjelaskan sistem *self assessment* yang diterapkan oleh pemerintah sudah paling sesuai dengan keadaan wajib pajak di Indonesia, berbeda dengan yang dinilai oleh kantor yang bisa menimbulkan ketidaksetujuan dari wajib pajak karena pada kenyataannya hanya wajib pajak sendiri yang bisa menilai kesanggupan membayar pajaknya. Ketiga, masyarakat yang telah patuh diharapkan bisa melakukan sosialisasi kepada rekan-rekannya sehingga pekerjaan petugas pajak semakin ringan. KPPKP Kabupaten Pacitan sendiri hanya memiliki 4 pegawai PNS tetap dan harus mengawasi wajib pajak satu Kabupaten.

Pada kenyataannya kondisi yang terjadi di lapangan saat ini tidak sesuai dengan harapan dari pihak KPPKP pada halaman 75. Bagi wajib pajak pengusaha kecil yang menggunakan PPh final sesuai PP no 46 tahun 2013 diharuskan untuk membayar pajak setiap bulan berdasarkan omzet yang dia dapatkan pada bulan tersebut. Pembayaran bisa langsung dilakukan di bank persepsi atau menggunakan *e-billing*. Bukti pembayaran akan memuat NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang sekaligus merupakan bukti pelaporan. Jadi khusus bagi pelaku usaha non-PKP tidak perlu melapor secara bulanan karena sistem telah mencatat NTPN sebagai bukti bayar. Kewajiban pelaporan SPT dilakukan akhir periode paling lambat bulan April tahun berikutnya. Pelaporan SPT tersebut memuat laporan kekayaan berupa harta, penghasilan, dan laporan pembayaran pajak final dari penghasilan yang telah wajib pajak lakukan mulai dari bulan Januari hingga Desember pada tahun yang sama tanpa ada lebih kurang bayar, karena PPh yang dibayarkan sebelumnya adalah PPh Final.

Dari permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, pihak KPPKP pada halaman 75 memberikan keterangan bahwasanya mereka telah melakukan upaya sosialisasi dimulai dari saat Wajib Pajak melakukan pendaftaran NPWP. Sudah merupakan suatu hal umum, jika wajib pajak baru tidak serta merta akan langsung memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Petugas pajak dengan sabar dan telaten harus mampu memberikan arahan dan penjelasan yang sesuai dengan daya tangkap masing-masing Wajib Pajak. Selanjutnya tergantung pada kemauan wajib pajaknya apakah mau untuk patuh atau tidak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Melihat keadaan yang sepertinya tanpa ujung ini, informan VI justru melihatnya sebagai peluang bagi ahli perpajakan. Di Kabupaten Pacitan belum terdapat tenaga profesional seperti konsultan pajak karena perputaran uang yang terjadi tidaklah banyak dan sistem yang dipakai oleh para pengusaha masih sederhana. Sedangkan bagi para pengusaha akan juga dirugikan jika mereka harus menambah karyawan hanya untuk mengurus pajaknya dari penghasilan yang tidak terlalu besar. Pajak penghasilan final sebenarnya sudah didesain sesederhana mungkin meskipun sisi keadilannya masih perlu dipertanyakan. Tetapi karena keterbatasan waktu dan tenaga, pengusaha masih merasa berat melakukannya. Pada halaman 76, informan VI memberikan saran atas permasalahan ini supaya ada bantuan dari orang-orang diluar pegawai pajak yang paham bidang ini untuk membantu menyelesaikan urusan perpajakannya. Informan menyebut ini sebagai peluang bagi *fresh graduate* atau peserta magang untuk bisa mandiri dan

menambah pengalaman praktik dengan terjun langsung ke lapangan membantu wajib pajak yang kesulitan mengadministrasikan pajaknya.

Solusi yang diberikan oleh informan tersebut bisa dijadikan pertimbangan mengingat semakin mendesaknya kebutuhan pendanaan bagi pemerintah namun perlu dikaji ulang dan bila dipraktekkan, perlu adanya kejelasan supaya tidak terjadi penyelewengan. Bagi wajib pajak membantu negara dengan memunaikan kewajiban merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Kerelaan untuk sepenuhnya patuh terhadap peraturan pemerintah membutuhkan upaya yang besar. Hal tersebutlah yang menjadikan penghindaran dan penggelapan pajak masih menjadi hal yang umum terjadi di masyarakat.

Wajib pajak membutuhkan dorongan dari pemerintah untuk mau memenuhi kewajibannya, karena hak masyarakat juga dipegang oleh pemerintah. Hubungan antara masyarakat dalam hal ini wajib pajak dengan pemerintah harus berjalan sismbiosis mulualisme. Seperti yang ada pada teori *“The Relationship of the Individual to the State”* dalam jurnal *“An Analysis of Some Arguments”*, McGee menjelaskan bagaimana bila hubungan antara pemerintah dengan individu diibaratkan majikan dengan budak. Bila dalam suatu pemerintahan, pemerintah bertindak layaknya majikan dan individu diberlakukan sebagai budak, maka rakyat tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Sebaliknya, jika individu dianggap sebagai majikan dan pemerintah merupakan budak dari rakyat, maka ada kewajiban mutlak bagi individu untuk membayar pajak dengan patuh.

Dari ilustrasi diatas, bisa dilihat bahwa bila individu tidak diberlakukan sebagai majikan, maka tidak ada kewajiban yang absolut untuk membayar pajak.



Inilah yang perlu menjadi perhatian utama oleh pemerintah untuk mengurangi praktik penghindaran dan penggelapan pajak yang terjadi pada masyarakat menengah. Pemerintah perlu menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat melalui bukti nyata dalam hal menyejahterakan rakyat, terutama pada golongan menengah ke bawah yang berada di wilayah kabupaten yang kurang berkembang ekonominya. Melakukan hal semacam ini membutuhkan upaya dari bidang lain selain perpajakan. Salah satu yang dapat mewujudkannya adalah pemerintah daerah.

Pemerintah daerah adalah wakil dari pemerintahan pusat. Otonomi daerah harus dimanfaatkan dengan baik dan maksimal karena hal tersebut bisa menjadi cerminan pemerintahan pusat yang baik. Tidak selamanya daerah harus selalu bergantung dari pusat. Justru yang seharusnya terjadi pemerintah pusat yang bergantung pada kinerja pemerintah daerah. Masing-masing daerah di Indonesia memiliki kekayaan alam dan kearifan lokal yang berbeda-beda. Apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi tersebut dengan memanfaatkan sumber daya manusia terbaiknya, pasti masyarakat bisa memberikan apresiasi yang positif.

Penggerak ekonomi suatu negara adalah pengusaha, baik lokal maupun dari luar. Namun bila pengusaha lokal diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, maka diharapkan akan dapat memperkuat pondasi ekonomi daerah sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Kerjasama inilah yang harus bisa diwujudkan oleh setiap pemimpin daerah dalam mengatur

keperintahannya. Bukan semata menghabiskan uang pajak pada hal yang sifatnya tidak berkelanjutan.

Tugas pemerintahan pusat dan daerah tentunya berbeda, namun bukan berarti antara pusat dan daerah tidak ada hubungan yang saling membantu. Dana pajak yang dihimpun oleh pemerintah pusat diberikan kepada pemerintah daerah dengan bagian-bagian yang secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang. Melalui asas desentralisasi, amanat dana pajak pun berpindah tangan menuju pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan caranya masing-masing harus mampu menunjukkan kreatifitas dan inovasi untuk menggerakkan sumber daya manusia di daerah menjadi lebih mandiri. Pemimpin daerah harus jeli dalam melindungi kekayaan daerahnya, baik aset maupun manusianya.

Semakin baik suatu ekonomi di daerah maka akan semakin meningkatkan daya beli masyarakat dan pendapatan per kapita pun bisa naik. Pendapatan orang pribadi yang tinggi akan mengakibatkan pajak yang mereka bayar semakin besar. Artinya pemerintah kemudian bisa menggali potensi pajak yang lebih besar lagi dari sini. Selain itu, dengan meningkatnya daya beli masyarakat, pendapatan negara dari pajak pertambahan nilai juga bisa naik.

Keberhasilan sistem pajak tidak bisa berdiri sendiri, namun perlu didukung oleh bidang-bidang lain. Masyarakat mungkin memang tidak bisa menikmati manfaat pajak secara langsung. Tapi apabila uang pajak digunakan untuk membiayai program-program yang berkelanjutan, maka masyarakat pada akhirnya juga akan bisa ikut menikmati hasilnya. Semakin banyak pihak yang dibantu dan diperhatikan oleh pemerintah daerah maka akan semakin tinggi pula tingkat

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Jika masyarakat bisa ikut merasakan kinerja pemerintah yang berimbas langsung pada kesejahteraan masyarakat maka mereka pun tanpa ragu akan memberikan umpan balik positif kepada pemerintah yang diwujudkan pada kepatuhan membayar pajak.

#### **D. Keterbatasan Peneliti**

1. Dalam melakukan pengumpulan data primer, tidak mudah untuk menemukan informan yang sesuai dengan harapan. Pengusaha juga cenderung menutupi informasi rahasia yang berkaitan dengan keuangan perusahaan yangmana hal tersebut berkaitan dengan jumlah pembayaran pajak yang menjadi kewajiban mereka.
2. Penilaian sikap etis hanya bisa dilakukan melalui persepsi dan tindakan wajib pajak dalam melakukan administrasi perpajakan sehingga data yang tersedia terbatas pada pengetahuan wajib pajak.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan mengenai sikap etis wajib pajak pada penghindaran dan penggelapan pajak melalui studi kasus pada pengusaha UMKM di Kabupaten Pacitan, maka peneliti menyimpulkan:

1. Wajib pajak UMKM di Kabupaten Pacitan pada umumnya masih memiliki sikap mendukung pada perilaku penghindaran dan penggelapan pajak. Hal tersebut ditunjukkan pada sikap mereka terhadap aturan perpajakan yang kurang patuh. Sikap yang mendukung penghindaran dan penggelapan pajak tersebut antara lain ketidakjujuran dalam menyampaikan SPT, terlambat dalam membayar pajak, serta tidak memenuhi kewajibannya sebagai WP terdaftar. Termasuk dalam membuat NPWP, kebanyakan dari mereka melakukannya karena terpaksa. Dimana saat ini banyak tender atau proyek yang mengharuskan pengusaha untuk memiliki NPWP. Jika tidak demikian, maka ada kemungkinan pengusaha disini juga tidak akan mendaftarkan dirinya untuk memiliki NPWP, meski ada sebagian lain yang dengan kesadarannya sendiri berusaha untuk mendapatkan NPWP tanpa kontraprestasi apa-apa.
2. Alasan yang mendukung sikap etis wajib pajak UMKM Kabupaten Pacitan antara lain berkaitan dengan: anggapan mengenai sistem pajak yang rumit,

tingkat kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah, keadaan ekonomi yang menyebabkan pengusaha harus menyimpan lebih banyak uang, kesadaran wajib pajak, sanksi hukum yang memberatkan, ketidaktahuan atas informasi perpajakan, dan pelayanan pegawai pajak.

3. Solusi yang bisa diberikan untuk meningkatkan sikap etis yang baik guna menentang adanya penghindaran maupun penggelapan pajak adalah dengan tidak memberikan alasan kepada wajib pajak untuk tidak patuh, seperti misalnya penindakan tegas praktik KKN. Pemerintah harus bisa menjadi motivator yang baik dengan terus berupaya melaksanakan amanat rakyat dalam melindungi dan membantu menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan yang optimal. Hal tersebut supaya ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Menumbuhkan kesadaran wajib pajak harus dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dengan saling mengingatkan kewajibannya satu sama lain.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka mengurangi praktik penghindaran dan penggelapan pajak pada pengusaha UMKM di Kabupaten Pacitan:

1. Wajib Pajak akan benar-benar patuh dalam mengadministrasikan pajaknya apabila terdapat tindakan tegas dari fiskus untuk mendisiplinkan Wajib Pajak. Oleh karenanya *Account Representatif (AR)* harus aktif dalam melaksanakan



tugas pengawasan. Selain itu Surat Tagihan Pajak (STP) sebaiknya diterbitkan pada periode setelah masa pajak berakhir dalam jangka waktu satu tahun guna menghindari keadaan dimana Wajib Pajak pada kondisi tidak mampu membayar pajak karena keadaan ekonomi suatu usaha yang cenderung berubah-ubah.

2. Penambahan jumlah petugas pajak yang cakap dalam menguasai keseluruhan ilmu perpajakan sehingga mampu membantu segala permasalahan Wajib Pajak yang berkaitan dengan administrasi dan pembayaran pajak.
3. KPPKP Kabupaten Pacitan diharapkan dapat menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menampung Wajib Pajak dalam melaksanakan administrasi pajak secara online, seperti menyediakan ruangan beserta peralatan komputer dengan akses internet bagi setiap wajib pajak yang ingin belajar praktik administrasi pajak sehingga wajib pajak tidak hanya mendapat penjelasan secara teori semata.
4. Syarat pengajuan PKP (Pengusaha Kena Pajak) ataupun pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) sebaiknya lebih dipermudah melalui sistem *online* dan diproses dalam jangka waktu tidak melebihi satu bulan supaya tidak membuang tenaga dan waktu Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan usaha. Termasuk dalam hal pelaporan SPT bagi WP UMKM, baiknya tidak memerlukan lampiran yang banyak dan rumit karena hanya akan menambah beban bagi WP yang bersangkutan.
5. Peningkatan kesadaran wajib pajak perlu ditekankan sedini mungkin melalui pembentukan program dirjen perpajakan seperti *tax go to school* ataupun *tax*

*goes to campus* yang bersifat aktif dan berkelanjutan supaya generasi muda saat ini bisa memberikan perubahan pada generasi lanjut yang lebih dulu memegang kendali pasar.

6. Kerjasama dengan Dinas UMKM guna menghimpun data yang lebih akurat dalam hal penggalian potensi pajak pada sektor UMKM yang ada di Kabupaten Pacitan.
7. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan pendisiplinan Wajib Pajak, disarankan kepada DJP untuk mengembangkan sistem CRM (*Customer Relationship Management*) ke tingkat yang lebih tinggi melalui pemanfaatan data wajib pajak yang diperoleh DJP sebagai penghubung langsung antara pemerintah dengan wajib pajak secara subjektif. Wajib pajak bisa mendapat pemberitahuan mengenai tunggakan pajaknya melalui email, sms, atau sms pop-up yang diterima langsung pada telepon genggam wajib pajak bersangkutan. Termasuk pemanfaatan sosial media seperti twitter, facebook, telegram, dan line sebagai tempat untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada alasan mengenai keterbatasan informasi yang diterima wajib pajak.
8. Diharapkan kepada penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian pada situs dan tempat penelitian yang memiliki perbedaan karakteristik dengan lokasi penelitian ini sehingga akan memberikan hasil penelitian yang bisa dibandingkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2007. Psikologi Sosial. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anonim. Maret 2016 Pertumbuhan Ekonomi Pacitan Melambat, diakses pada Tanggal 10 Januari 2017 dari <https://pacitanku.com/2016/03/20/pertumbuhan-ekonomi-pacitan-melambat/>
- Anonim. Jumlah UMKM dan Tenaga Kerja di Propinsi Jawa Timur. diakses pada Tanggal 7 Maret 2017 dari <http://diskopumkm.jatimprov.go.id/view-media.php?pages=content&id=57&bidang=>
- Anonim. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 2013.
- Anonim. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 2008.
- Azwar, Saifuddin.  
2005. Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bird, Richard M. 2013. Taxation and Development: What Have We Learned from Fifty Years of Research?. *IDS Working Paper*. Vol 2013 No 427
- Bird, Richard M and Sally Wallace. 2003. Is It Really Hard to Tax the Hard-to-Tax? The Context and Role of Presumptive Taxes. ITP Paper 0307. Toronto, Ontario: University of Toronto.
- Burns, Lee and Richard Krever. 1998. Individual Income Tax. Dalam Thuronyi, Victor, *Tax Law Design and Drafting Vol 2*. Washington DC: IMF.
- Creswell, John W. 2009. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches – 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Darussalam dan Ganda C. Tobing. 2014. Rencana Aksi Base Erosion Profit Shifting dan Dampaknya terhadap Peraturan Pajak di Indonesia. *Working Paper International Taxation Series No 0714*. Jakarta: DDTC
- Elam, Latansa. 2016. Antara Tax Amnesty dan Hard-toTax Sector, diakses pada Tanggal 27 Januari 2017 dari <http://news.ddtc.co.id/artikel/6548/analisis-antara-tax-amnesty--hard-to-tax-sector/>

- Faiq, Nuraini. Desember 2016. Pakde Karwo: Koperasi dan UMKM Jadi Andalan Jatim Hadapi MEA, diakses pada tanggal 7 Maret 2017 dari <http://surabaya.tribunnews.com/2016/12/15/pakde-karwo-koperasi-dan-umkm-jadi-andalan-jatim-hadapi-mea/>
- Hall, Robert., and Alvin Rabusha. 1983. Low Tax, Simple Tax, Flat Tax. New York: McGraw-Hill.
- Harjo, Dwikora. 2013. Perpajakan Indonesia: Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ika, Kepala KPP Wonosari Raih Doktor Usai Teliti Penggelapan Pajak, diakses pada tanggal 28 Desember 2016 dari <http://www.ugm.ac.id/index.php?page=rilis&artikel=4561>
- Kang, Minjo. 2016. A Psychological Perspective on Tax Avoidance: Deferential Avoidance Vs Deviant Avoidance, *eJurnal of Tax Research*. Vol 14 No 1, pp 235-296.
- Khairani, Dienda dan Suci Noor Aeny. Mei 2016. Beramai-ramai Melawan Praktik BEPS. *Insidetax* ed 38. Jakarta: DDTTC Indonesia, pp 6-16.
- Luqman. April 2016. Pengertian dan Jenis Tarif Pajak, diakses pada Tanggal 23 Januari 2017 dari <http://kringpajak.com/pengertian-dan-jenis-tarif-pajak/http://kringpajak.com/pengertian-dan-jenis-tarif-pajak/>
- McGee, Robert W. 2012. Four Views on the Ethics of Tax Evasion. *The Ethics of Tax Evasion: Perspectives in Theory and Practice*. New York: Springer. p 3-33.
- \_\_\_\_\_. 2012. Duty to Whom. *The Ethics of Tax Evasion: Perspectives in Theory and Practice*. New York: Springer. p 35-45.
- \_\_\_\_\_. 2012. An Analysis of Some Arguments. *The Ethics of Tax Evasion: Perspectives in Theory and Practice*. New York: Springer. p 47-71
- McGee, Robert W., Simon S. M. Ho & Annie Y. S. Li. 2008. A Comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong Vs the United States, *Journal of Business Ethics*.
- Nurmantu, Safri. Pengantar Perpajakan. 2003. Jakarta: Granit
- Prasetyo, Sigit. 2010. Persepsi Etis Penggelapan Pajak Bagi Wajib Pajak di Wilayah Surakarta. Sripsi. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Rahayu, Ning. 2010. Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.

Vol 7 - No 1, pp 61-78.

- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmat, Muhamad. 2011. Ketidakadilan dibalik Kesederhanaan PPh Final, diakses pada Tanggal 27 Januari 2017 dari <http://www.fiscuswannabe.web.id/2011/05/ketidakadilan-di-balik-kesederhanaan.html?m=1>
- Reskino. Rini dan D. Novitasari. 2013. Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak. Makalah, Simposium Nasional Perpajakan IV. Bangkalan.
- Robbins, Stephen P. Dan Timothy A. 2015 Judge. Perilaku organisasi. Jakarta: Salemba empat., 43-44
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2011. Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia. Jakarta: Visimedia.
- \_\_\_\_\_. 2012. Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shomali, Mohammad A. 2001. Relativisme Etika. Jakarta: Serambi.
- Sugiyarto. Desember 2016. Tunggak Bayar Pajak Ratusan Juta Rupiah, Pengusaha Pupuk di Pacitan Disandera di Rutan, diakses pada Tanggal 10 Januari 2017 dari <http://www.tribunnews.com/regional/2016/12/09/tunggak-bayar-pajak-ratusan-juta-rupiah-pengusaha-pupuk-di-pacitan-disandera-di-rutan>
- Syusanti, Jeni., dan Ahmad Dahlan. 2015. Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi. Malang: Empatdua Media.
- Thuronyi, Victor. 1996. Tax Law Design and Drafting. Washington DC: IMF.
- Velasquez, Manuel G. 2005. Etika Bisnis: Konsep dan Kasus. Yogyakarta: Andi.
- Waluyo dan Wirawan B. Illyas. 2003. Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad. 2003. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.